

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS SUBSIDI PERIKANAN NON BBM TERHADAP
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI KABUPATEN PIDIE JAYA**



**TAPM ini Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

S A S T R I

NIM. 018873725

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

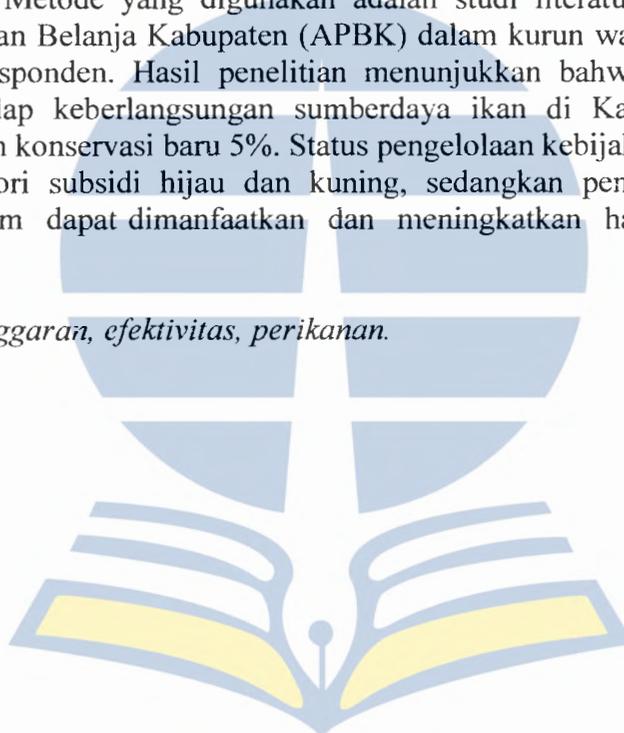
ABSTRAK

ANALISIS SUBSIDI PERIKANAN NON BBM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA

Sastri
Pascasarjana Universitas Terbuka
sastri.gayo@yahoo.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan efektifitas subsidi perikanan non BBM berdasarkan aspek sumberdaya ikan, teknologi, sosial dan kelembagaan di Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dalam kurun waktu 2009 - 2013 dan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran bernilai positif terhadap keberlangsungan sumberdaya ikan di Kabupaten Pidie Jaya, walaupun untuk kegiatan konservasi baru 5%. Status pengelolaan kebijakan sudah cukup baik (sedang) dengan kategori subsidi hijau dan kuning, sedangkan pemberian subsidi bagi responden secara umum dapat dimanfaatkan dan meningkatkan hasil produksi antara 150 – 300%.

Kata kunci : *Alokasi anggaran, efektivitas, perikanan.*



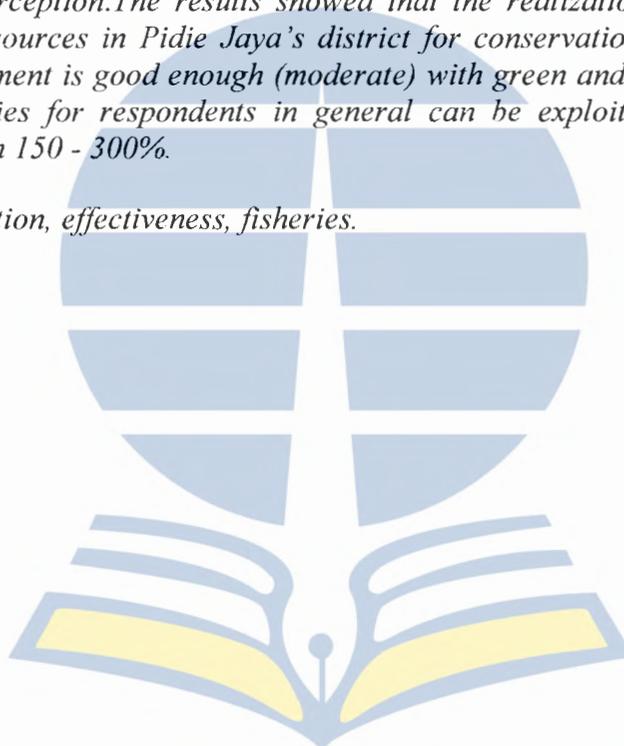
ABSTRACT

FISHERIES SUBSIDIES ANALYSIS OF NON FUEL MANAGEMENT OF MARINE AND FISHERIES POLICY DISTRICT PIDIE JAYA

Sastri
Post Graduate Open University
sastri.gayo@yahoo.com

The objective of the present study was to analyze the budgetary trends and the effectiveness of fisheries subsidies based on fish resources, technological, social and institutional aspects in Pidie Jaya District. The literature and survey methods were utilized in this study. The secondary data of Pidie Jaya's budget documents in the period of 2009 - 2013 and key person interviews with fishermen leaders were conducted to analysis the subsidy trend and fishermen perception. The results showed that the realization is positive on the sustainability of fish resources in Pidie Jaya's district for conservation while has 5%, the status of policy management is good enough (moderate) with green and yellow categories of subsidies. While subsidies for respondents in general can be exploited and improve the production yield between 150 - 300%.

Keyword: Budget allocation, effectiveness, fisheries.



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Analisis Subsidi Perikanan Non BBM terhadap Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa *Pencabutan Ijazah dan Gelar*.

Banda Aceh, 19 Agustus 2015

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

9B8CEADF224541161

6000
ENAM RIBU RUPIAH

SASTRI

NIM: 018873725

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Subsidi Perikanan Non BBM terhadap Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya
Penyusun TAPM : Sastri
NIM : 018873725
Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
Hari/Tanggal : Rabu/9 Agustus 2015

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muchlisin, Z. A. S.Pi, M.Sc.
NIP. 19710911 199903 1 003

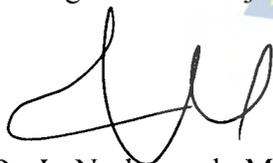
Pembimbing II,



Dr. Bambang Deliyanto, M.Si
NIP. 195601271986021001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Ilmu Kelautan
Bidang Minat Manajemen Perikanan,



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002

Direktur Program Pascasarjana,



Suwati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU KELAUTAN
BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

PENGESAHAN

Nama : Sastri
 NIM : 018873725
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
 Judul TAPM : Analisis Subsidi Perikanan Non BBM terhadap Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/6 Juni 2015
 Waktu : 09.00 – 11.00

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Drs. Enang Rusyana, M.Pd

Penguji Ahli : Dr. Etty Riani, MS

Pembimbing I : Prof. Dr. Muchlisin, Z. A, S.Pi, M.Sc

Pembimbing II : Dr. Bambang Deliyanto, M.Si






KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul “Analisis Subsidi Perikanan Non BBM terhadap Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya”. TAPM ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Perikanan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh selaku penyelenggara Program Pascasarjana beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan layanan selama penulis mengikuti semua tahapan studi di Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan Universitas Terbuka;
3. Prof. Dr. Muchlisin, M. Sc selaku Pembimbing I dan Dr. Bambang Deliyanto selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini;
4. Ketua Bidang Ilmu MIPA Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si selaku penanggung jawab Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan;

5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Ir. Jailani, Kepala Bidang: Yulizar, S.Pi, T. M. Daut, S.Pt, T. Yulius, S.Sos, T. Anwar, S.Pi beserta semua rekan-rekan yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga TAPM ini dapat diselesaikan;
6. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulusnya kepada Almarhum Ayahanda Hasbi, S. Pd dan Ibunda Sukmawati, A. Ma. Pd yang telah membesarkan penulis dengan doa restu, kasih sayang dan cinta kasih sehingga mendukung keberhasilan studi penulis hingga jenjang ini, serta ucapan terima kasih kepada suami tercinta Fajriansyah, SKM, M. Kes atas segala perhatian, pengertian, motivasi, doa serta pengorbanan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Kelautan bidang minat Manajemen Perikanan UPBJJ-UT Banda Aceh yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis selama penulis menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, semoga semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT dan semoga TAPM ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Amiiin.

Pidie Jaya, 21 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Teori	5
1. Pengertian subsidi	5
2. Pengertian, Jenis dan Indikator Subsidi Perikanan	7
3. Definisi anggaran	11
4. Jenis dan Fungsi Subsidi Anggaran	13
5. Kebijakan Perikanan	15
6. Kemiskinan Nelayan	17
7. Konservasi dan Investasi Hijau untuk Perikanan (<i>Green Investment for Fisheries</i>) yang Berkelanjutan	19
B. Kerangka Berpikir	20

C. Definisi Operasional.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Desain Penelitian.....	25
B. Populasi dan Sampel	25
C. Instrumen Penelitian.....	28
D. Prosedur Pengumpulan Data	28
1. Jenis data.....	28
2. Metode Penelitian.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Status Subsidi.....	29
5. Status Kebijakan Perikanan Hijau.....	37
6. Efektivitas Pemanfaatan Subsidi Perikanan Non BBM.....	40
E. Analisis Data.....	40
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Temuan.....	41
1. Gambaran umum Kabupaten Pidie Jaya.....	41
2. Potensi perikanan di Kabupaten Pidie Jaya	46
3. Perikanan tangkap.....	46
4. Perikanan budidaya.....	51
5. Pengolahan.....	53
B. Pembahasan.....	56
1. Keragaan subsidi.....	56
2. Bidang perikanan tangkap dan konservasi.....	59
3. Bidang perikanan budidaya.....	66
4. Bidang pengawasan, pengendalian mutu sumberdaya kelautan dan perikanan.....	70
5. Bidang pengembangan pengolahan hasil perikanan (P2HP)	74
6. Status dan Arah Kebijakan Pengelolaan Subsidi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya	78
7. Efektifitas Pemanfaatan Subsidi Perikanan	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	109



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Pedoman Pemberian Subsidi Perikanan Sesuai dengan Kualitas Pengelolaan Kawasan atau jenis Perikanan yang Menjadi Target Subsidi Perikanan (WWF-Indonesia, 2013).....	26
2. Pedoman Identifikasi Pembiayaan Pemerintah yang Berpotensi Menjadi Subsidi Perikanan	27
3. Matriks Kriteria dan Skor Komponen Pengelolaan Perikanan.....	27
4. Total Populasi pada Masing-masing Lokasi Penelitian.....	31
5. Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan pada Masing-Masing Lokasi Penelitian	34
6. Jumlah Kriteria Responden Berdasarkan Kecamatan pada Masing-Masing Lokasi Penelitian	38
7. Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.....	42
8. Sebaran Kategori Nelayan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013	46
9. Sebaran Armada Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013	47
10. Jenis Alat Menangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013.....	48
11. Sebaran Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Pada Tahun 2013.....	49
12. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013.....	50
13. Luas Areal Potensial Budidaya dan Pemanfaatannya di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013.....	51
14. Luas Lahan Budidaya Tambak dan Kolam Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013	51
15. Sebaran Jumlah Pembudidaya Ikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013	52

16.	Jumlah Produksi Budidaya Berdasarkan Komoditas di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013.....	53
17.	Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Pidie Jaya Pada Tahun 2013	54
18.	Jumlah Pengolah Ikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013	55
19.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013	55
20.	Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Ikan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013	55
21.	Total Penerimaan dan Belanja di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 – 2013	58
22.	Total Alokasi Anggaran belanja Langsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 – 2013.....	58
23.	Alokasi Anggaran Bidang Perikanan Tangkap Sesuai Jenis Bantuan Tahun 2009 – 2013	60
24.	Jumlah Anggaran Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2009 – 2013.....	66
25.	Perbandingan Proporsi Anggaran Menurut Jenis Budidaya Tahun Anggaran 2009 – 2013	68
26.	Alokasi Anggaran Bidang Budidaya Perikanan Sesuai Jenis Bantuan Tahun 2009 – 2013	69
27.	Alokasi Anggaran Bidang Pengolahan Sesuai Jenis Bantuan Tahun 2009 – 2013	76
28.	Hasil Matriks Kriteria dan Skor Komponen Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya.....	80
29.	Pedoman Pemberian Subsidi Perikanan Sesuai dengan Kualitas Pengelolaan Kawasan atau Jenis Perikanan yang Menjadi Target Subsidi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya	82
30.	Rata-rata Hasil Produksi Sebelum dan Sesudah Menerima Subsidi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya	95

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Nama-Nama Responden Penelitian Berdasarkan Kecamatan	109
2.	Lembar Kuesioner Penelitian	113
3.	Foto Penyerahan Bantuan Armada dan Alat Tangkap kepada Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya	121



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Secara umum Kabupaten Pidie Jaya merupakan wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 38,9 km² dan luas wilayah pengelolaan laut 210,84 km² serta memiliki potensi perikanan darat seluas 2.077,23 ha, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor andalan untuk memacu roda pembangunan di daerah ini dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian.

Guna menunjang pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya diperlukan subsidi baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh nelayan dan petani ikan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan.

Sebagian besar nelayan mengalami kesulitan modal baik dalam bentuk uang maupun sarana yang digunakan untuk membudidayakan maupun untuk menangkap ikan. Subsidi pemerintah merupakan salah satu cara yang tepat untuk membantu nelayan dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas, terutama bagi nelayan kecil dengan modal yang sangat terbatas. Peningkatan

produktivitas nelayan akan diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor perikanan bagi perekonomian.

Peningkatan eksploitasi penangkapan ikan dan penurunan kualitas laut dan pesisir dapat mengancam keanekaragaman hayati. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah tekanan pengelolaan sumberdaya hayati adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan yang ramah lingkungan. Menurut Muchlisin *et al.* (2012a) dibutuhkan program untuk memperkuat kebijakan subsidi perikanan untuk melindungi dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di masa yang akan datang seperti penerapan *Green Fisheries Subsidies* (GFS) seperti program *Green Fisheries Subsidies Policy* (GFSP), *Green Reconstruction Guidelines* (GRG), *Green Coast* (GC) dan *Green Investment for Fisheries* (GIFF).

Jenis alokasi subsidi non BBM yang diberikan di Kabupaten Pidie Jaya berupa: bantuan subsidi benih, pakan, pupuk, obat-obatan, rehap/bangun/program pengembangan, alat dan bahan pengolahan, pengadaan alat tangkap, armada penangkapan dan alat kerja/mesin. Handoko dan Patriadi (2005) mengatakan subsidi non BBM terdiri dari subsidi listrik, bunga kredit program, pangan, pupuk, benih, dan PSO (*public service obligation*) yang bertujuan menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil serta menengah dalam memenuhi kebutuhannya. Subsidi non BBM umumnya disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menghasilkan dan menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya dapat lebih rendah dari pada harga pasarnya dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemberian subsidi perikanan sangat diperlukan oleh nelayan dan pembudidaya ikan, akibat kekurangan modal, penguasaan teknologi rendah dan hari melaut yang tak pasti karena cuaca buruk. Sejauh ini pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya dinilai belum optimal, terutama dalam pengembangan perikanan hijau.

Dilain pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya telah mengalokasikan sejumlah anggaran dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik yang berasal dari dana APBK, APBD maupun APBN, namun sejauh ini kehidupan nelayan tidak menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti ke arah yang lebih baik dan evaluasi terhadap subsidi yang telah diberikan juga belum pernah dilakukan. Diduga subsidi yang diberikan selama ini belum efektif dan berdaya guna maksimal. Dalam pemberian subsidi harus mempertimbangkan kondisi sumberdaya ikan, teknologi penangkapan, lingkungan, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Berdasarkan uraian tersebut perlu dilaksanakan penelitian tentang evaluasi terhadap subsidi perikanan dalam menuju perikanan *Green Investment for Fisheries* (GIFF) atau investasi hijau untuk perikanan di Kabupaten Pidie Jaya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi subsidi anggaran yang bersumber dari pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya?

2. Apakah subsidi perikanan yang dilakukan selama ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip perikanan hijau, terutama ditinjau dari aspek teknologi, sosial dan kelembagaan?
3. Bagaimana strategi dalam menentukan alokasi anggaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip perikanan hijau di Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis realisasi subsidi anggaran yang bersumber dari pemerintah yang dipergunakan untuk mendukung program pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya;
2. Menganalisis efektivitas subsidi anggaran baik APBK, APBD dan APBN di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan aspek teknologi, sosial dan kelembagaan.
3. Menentukan strategi alokasi anggaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip perikanan hijau di Kabupaten Pidie Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah :

1. Peneliti: memberikan informasi tentang efektivitas subsidi anggaran baik APBK, APBD dan APBN di Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah: masukan bagi pihak terkait terutama pemerintah dalam merencanakan alokasi subsidi anggaran di masa depan.
3. Sains: sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi subsidi anggaran dan menambah ilmu pengetahuan tentang subsidi perikanan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Subsidi

Sugiarto (2007) secara umum mengatakan subsidi merupakan alokasi dana publik kepada masyarakat tertentu dan kewenangan kebijakannya berada pada pemerintah untuk kesimbangan pasar. Spencer dan Amos (1993) menambahkan subsidi merupakan alat pembayaran yang dilakukan pemerintah pada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu untuk memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Pada umumnya subsidi berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, namun pada realisasinya subsidi dapat berasal dari suatu perusahaan atau pihak swasta lainnya (Lisnawati, 2012).

Yusgiantoro (2000) menyatakan bahwa kebijakan subsidi berlaku ketika harga suatu produk tidak sebanding dengan daya beli masyarakat miskin. Selanjutnya Budiyantri (2012) menambahkan subsidi dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya beli terhadap akses barang dan jasa. Selanjutnya Dewi (2012) mengemukakan subsidi merupakan kebijakan fiskal pemerintah untuk menunjang pembangunan, peningkatan pendapatan dan devisa, menjamin ketersediaan pangan dan lapangan kerja serta bahan baku industri perikanan domestik.

Suparmoko (2003) menerangkan subsidi merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat juga diartikan pajak negatif yang akan menambah pendapatan pihak yang menerima subsidi. Namun kebijakan subsidi menimbulkan pendapat pro dan kontra, sebahagian berpendapat subsidi harus dihapuskan, sementara disisi lain mengatakan subsidi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (Handoko dan Patriadi, 2005). Secara umum subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*). Sedangkan di Indonesia terdapat tiga kelompok subsidi, yaitu: subsidi pengurangan harga di bawah pasar (*price distorting subsidies*), bantuan tunai (*cash grant*), dan subsidi pemotongan pajak (Budyanti, 2012).

Suparmoko (2003) menambahkan kelebihan subsidi dalam bentuk uang yaitu lebih murah bagi pemerintah dalam menurunkan harga dan memberikan kebebasan dalam membelanjakannya, sedangkan subsidi dalam bentuk barang dapat mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi walaupun konsumsi total bertambah, tidak mengubah konsumsi total, konsumsi menjadi terlalu rendah (*over consumption*), dan konsumsi menjadi terlalu rendah (*under consumption*).

Handoko dan Patriadi (2005) mengemukakan subsidi dalam bentuk uang diberikan pemerintah sebagai tambahan penghasilan bagi masyarakat atau kepada produsen untuk menurunkan harga barang yang diproduksi. Sedangkan subsidi dalam bentuk barang disesuaikan dengan jenis barang tertentu, namun subsidi ini lebih efektif daripada subsidi dalam bentuk uang. Jadi subsidi

merupakan pemberian bantuan oleh pemerintah maupun swasta kepada masyarakat baik dalam bentuk uang maupun barang.

2. Pengertian, Jenis dan Indikator Subsidi Perikanan

Schrank dan Keithly (1999) mengatakan bahwa subsidi perikanan merupakan program atau aksi yang dilaksanakan pemerintah yang potensial untuk meningkatkan keuntungan. Luhur dan Sari (2012) menambahkan subsidi perikanan merupakan transfer finansial pemerintah kepada pelaku usaha yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan. Subsidi perikanan diberikan untuk membantu nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan, melalui manajemen berkelanjutan mendorong pembangunan dan berbagi informasi untuk melindungi kesehatan manusia, menyediakan keuntungan ekonomi dan sosial serta kontribusi pada keamanan pangan (Antara News, 2013).

Sari *et al.* (2012) mengemukakan subsidi perikanan merupakan usaha campur tangan dalam sektor kelautan dan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau nelayan. Selanjutnya Fauzi (2005) menambahkan subsidi perikanan dapat meningkatkan hasil produksi, namun juga dapat meningkatkan laju penangkapan sumberdaya ikan sehingga mengakibatkan terjadinya *overfishing*. Pemberian subsidi perikanan secara langsung dapat menyebabkan rendahnya biaya operasional penangkapan ikan, sedangkan secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan kualitas hasil tangkapan karena semakin sempurnanya infrastuktur yang mendukung usaha penangkapan (Zulham, 2008).

Dalam penganggaran pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan. Salah satu faktor untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah dengan memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (WWF, 2007).

Dampak subsidi perikanan dapat dibagi dua yaitu: dampak terhadap distribusi pendapatan dan dampak terhadap pengelolaan dan kelestarian sumberdaya perikanan (Dewi, 2012). Markus (2010) mengatakan subsidi perikanan harus berperan dalam kelestarian sumberdaya ikan. Selanjutnya Millazo (1998) menambahkan dampak subsidi terhadap pengelolaan sumberdaya terdiri dari dua yaitu subsidi yang mampu mengendalikan usaha (*effort*) sehingga mendorong kelestarian sumberdaya (*good subsidies*) dan subsidi yang tidak mendorong kelestarian sumberdaya (*bad subsidies*).

Tipe subsidi perikanan umumnya diberikan dalam bentuk: a. *direct financial assistance* (seperti untuk pembelian kapal, alat tangkap, modal usaha, penjaminan kredit), b. program preferensi pajak dan asuransi, c. pengembangan infrastruktur (misalnya pelabuhan), d. subsidi harga dan pemasaran, serta e. subsidi program konservasi dan pengelolaan sumber daya (Fauzi, 2005).

Kesteven (1973) dikutip oleh Dewi (2012) mengatakan subsidi perikanan terdiri dari tiga kategori, yaitu: a). subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*) merupakan subsidi yang dapat meningkatkan kapasitas tangkap dan mendistorsi perekonomian negara lain seperti subsidi ekspor dan subsidi kapal domestik menangkap ikan di negara lain, b). subsidi yang diperbolehkan (*actinable subsidies*) merupakan subsidi yang diharapkan mampu mendorong

penurunan kapasitas tangkap, mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat nelayan dan tidak merugikan negara lain seperti subsidi harga dan pemasaran, bantuan modal dan infrastruktur perikanan, penyempurnaan kualitas produk dan teknik menangkap ikan, bantuan bencana alam serta pemulihan sumberdaya dan c). subsidi yang termasuk antara kedua kategori (*non-actionable subsidies*) seperti subsidi asuransi dan asistensi nelayan serta kegiatan penelitian ilmiah. Basri (2002) menambahkan pemberian subsidi yang tidak transparan dan sesuai target (*well targetted*) menyebabkan pembentukan distorsi baru dalam perekonomian, menimbulkan inefisiensi dan tidak diterima oleh mereka yang berhak.

Sumaila *et al.* (2010) menambahkan subsidi perikanan yang berhubungan dengan potensi dampak terhadap kelestarian sumberdaya ikan terdiri dari tiga kriteria yaitu subsidi yang bermanfaat (*beneficial subsidies*), subsidi yang mendorong kapasitas penangkapan (*capacity-enhancing subsidies*) dan subsidi yang tidak selalu jelas dampaknya (*ambiguous subsidies*). Jadi subsidi perikanan merupakan program bantuan pemerintah yang bertujuan mendorong nelayan, pengolah dan pembudidaya agar dapat meningkatkan pendapatannya.

Harjoko (2013) mengatakan bahwa berdasarkan jenisnya subsidi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu subsidi energi (subsidi BBM dan listrik) dan subsidi non energi (subsidi pangan, pupuk, benih, PSO, bunga kredit program, minyak goreng, pajak, kacang kedelai, obat generik dan lainnya). Indikator kebijakan subsidi perikanan terdiri dari 4 komponen yaitu: nilai Produk Domestik Bruto (PDB), laju inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan (Anonim, 2013).

Indikator subsidi perikanan terdiri dari beberapa jenis yaitu: a) ekonomi mengacu pada pendapatan perkapita atau pendapatan rumah tangga perkapita dengan tidak melebihi 85% dari rata-rata wilayah setempat. b) sumberdaya ikan (SDI) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan pada tingkat lestari, produktivitas, efisiensi pelaku usaha dan mempertahankan mutu hasil tangkapan, c) teknologi/kapasitas penangkapan yaitu jumlah hasil tangkapan (intensitas operasi penangkapan) yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan armada penangkapan yang dimanfaatkan secara penuh pada sumberdaya tertentu dengan normal namun tidak terbatas dan bukan penggunaan maksimal secara fisik pada armada penangkapan, d) sosial yaitu pemberian informasi dan pengetahuan tentang hak (*rights*) dengan mempertimbangkan konsep perikanan berbasis hak (*right-based fisheries*) untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan komunitas nelayan, dan e) kelembagaan yaitu mekanisme yang terkait pelaksanaan kriteria untuk subsidi perikanan (WWF (2007). Stanis *et al.* (2007) menambahkan penguatan kelembagaan dapat memacu tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Irianto dan Soesilo (2007) mengatakan teknologi dalam penangkapan terdiri dari: a) efisiensi operasi penangkapan teknologi dengan penyediaan informasi yang akurat tentang posisi gerombolan ikan (*fishing ground*) yang didistribusikan secara berkala, b) teknologi rumpon yang efektif c) teknologi/alat tangkap dengan tingkat selektifitas yang tinggi d) teknologi penanganan atau penyimpanan hasil tangkap di atas kapal yang baik, sehingga kemunduran mutu ikan dapat dihindarkan, dan e) desain kapal yang memenuhi sanitasi mutu dan keamanan hasil tangkapan. Penerapan teknologi untuk perikanan budidaya

dilakukan dengan: pengembangan sistem budidaya yang efisien dan efektif, teknologi budidaya untuk komoditas baru yang digemari oleh masyarakat, penerapan teknologi perbenihan, teknologi pakan/nutrisi, pengembangan teknologi produksi artemia, teknologi deteksi dan pencegahan penyakit, dan peningkatan mutu melalui rekayasa genetika. Sedangkan penerapan teknologi pada bidang pengolahan dapat dikembangkan dengan teknologi ikan segar, penerapan teknologi ikan hidup, teknologi pengolahan tradisional dan modern.

3. Definisi Anggaran

Suminto (2004) mengatakan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan dan alat utama pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Selanjutnya Alim (2008) menambahkan anggaran merupakan suatu komponen yang saling terkait satu dengan lainnya yang terdiri dari penyusunan anggaran, penentuan sasaran, revisi, evaluasi dan umpan balik anggaran.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik yang harus diinformasikan untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Sedangkan pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik (Karundeng, 2012).

Welsch (2000) menambahkan anggaran merupakan suatu perencanaan sistematis untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen. Selanjutnya Mardiasmo (2002) menambahkan manfaat

anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kerja dan mengarahkan perilaku manajer dan karyawan.

Rinusu dan Mastuti (2003) mengatakan anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang, anggaran juga dapat dikatakan sebagai perincian penerimaan dan belanja operasional maupun belanja modal. Dengan demikian anggaran merupakan rencana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan kewenangan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran.

Anggaran dilaksanakan pada periode satu tahun ke depan yang mengacu pada anggaran dan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya sebagai tolak ukur pembuatan anggaran berikutnya (Fahrianta dan Carolina, 2012). Selanjutnya Alim (2008) mengemukakan proses penyusunan anggaran terkait kebijakan dan prosedur penentuan sasaran anggaran dengan mekanisme antara partisipatif dan instuktif.

Mardiasmo (2004) mengatakan anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan terdapat masalah keterbatasan sumberdaya (*scarcity of reseorces*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

Fahrianta dan Carolina (2012) mengemukakan anggaran disusun sebagai perencanaan yang berisi ringkasan rencana keuangan suatu organisasi di masa yang akan datang, sedangkan anggaran dipandang sebagai penilaian kinerja

yaitu anggaran dipakai sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial.

4. Jenis dan Fungsi Subsidi Anggaran

Menurut Atmaja (2009) secara umum keuangan dapat ditinjau berdasarkan dua hal: dalam arti luas keuangan terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keuangan negara pada perusahaan umum (Perum), persero dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit keuangan terdiri dari hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Bastian (2006) mengemukakan jenis anggaran dalam sektor publik terdiri dari: a) anggaran negara yang meliputi APBN dan APBD serta b) rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu setiap anggaran BUMN / BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik swasta.

Ekawarna *et al.* (2009) mengatakan tujuan anggaran publik (pemerintah) adalah: a) menyatakan harapan/sasaran pemerintah secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberi arah terhadap apa yang ingin dicapai oleh pemerintah, b) mengkomunikasikan harapan terhadap manajemen kepada pihak terkait sehingga anggaran mudah dimengerti, didukung dan dilaksanakan, c) menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dalam memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan, d) mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya dan e) menyediakan alat pengukur dan pengendalian kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Selanjutnya Mardiasmo (2002) menambahkan anggaran berfungsi untuk alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, komunikasi, penilaian kinerja, motivasi dan dapat menciptakan ruang publik.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember yang dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan daerah (Bastian, 2008).

Pinto (2013) mengatakan APBD merupakan dasar pengelolaan dasar keuangan daerah, sehingga dijadikan sebagai pengendali, pemeriksa dan pengawas keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri 13/2006 pasal 15 dijelaskan bahwa APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah setempat yang terdiri dari otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Jadi APBD merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran. implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Selanjutnya Bastian (2007) menambahkan bahwa APBD disusun dan diserahkan tepat waktu akan membuat pencairan anggaran juga tepat waktu akan bermuara kepada ketepatan sinergi para pelaku ekonomi.

Suminto (2004) mengatakan APBN merupakan faktor utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara yang meliputi keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan

negara/daerah dan badan lain yang berhubungan langsung dengan keuangan negara. Dana APBN yang dialokasikan ke daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

Subsidi perikanan diberikan untuk membantu nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan, melalui manajemen berkelanjutan mendorong pembangunan dan berbagi informasi untuk melindungi kesehatan manusia, menyediakan keuntungan ekonomi dan sosial serta kontribusi pada keamanan pangan (Antara News, 2013).

5. Kebijakan Perikanan

Dunn (1994) mengatakan kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan dengan menggunakan metode penelitian dan argumen guna menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan tentang perikanan. Dye (1978) menambahkan kebijakan merupakan upaya memahami yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, dengan kata lain dapat menjawab sebab akibat dari tindakan dan perbuatan pemerintah.

Ruray (2012) mengemukakan kebijakan perikanan merupakan pengaturan dan kewenangan wilayah antara pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya preventif, antisipatif, kuratif, serta represif dalam menanggulangi setiap isu serta ancaman terhadap keamanan, ketersediaan dan kelestarian sumberdaya perikanan baik secara sendiri maupun bersama-sama. Kebijakan subsidi perikanan berhubungan dengan kontribusi terjadinya kapasitas penangkapan yang berlebih (*overcapacity*) dan pemanfaatan sumberdaya secara berlebih (Schoor dan Caddy, 2007).

Kebijakan pengelolaan perikanan (*fisheries governance*) terdiri dari 3 unsur yaitu: jangkauan pengelolaan (*scope*), struktur pengelolaan dan persoalan biaya transaksi (Adrianto, 2006). Hanna (1999) menambahkan dalam menentukan kebijakan struktur pengelolaan perikanan selalu ada kesenjangan (*tradeoffs*) antara stabilitas dan fleksibilitas, antara otoritas dan keterwakilan, antara sosial dan individu. Fungsi utama dari struktur pengelolaan perikanan adalah adanya stabilitas dan konsistensi dari pengambilan keputusan ketika sistem atau kondisi senantiasa harus adaptif terhadap perubahan, dalam konteks ini maka struktur yang baik bagi pengelolaan perikanan adalah struktur yang stabil dalam konteks representasi, distribusi otoritas pengambilan keputusan dan informasi serta mampu memberikan batas yang jelas antara *advisory roles* dan *decision roles* (Nohria dan Gulati, 1994).

Wiyono (2006) mengatakan secara umum tujuan pengelolaan sumberdaya ikan ditujukan untuk mengoptimalkan tiga tujuan utama, yaitu: ekonomi, biologi dan sosial. Kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan diharapkan mampu untuk memuaskan aspek ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya sehingga mampu mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan secara berkelanjutan. Namun demikian, dari ketiga tujuan utama tersebut, khususnya antara tujuan ekonomi dan biologi sangatlah bertentangan dan tidak mungkin untuk dicapai secara bersamaan. Mengoptimalkan ekonomi akan berdampak pada perusakan sumberdaya ikan dan sebaliknya mengoptimalkan sumberdaya ikan (kelestarian sumberdaya ikan) tidak akan mampu memuaskan aspek ekonomi.

Mulyadi (2005) mengemukakan kelemahan mendasar pemerintah dalam menentukan kebijakan bidang perikanan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: a). belum ada kebijakan yang membatasi jumlah penangkapan stok ikan di suatu kawasan, b). tidak adanya tata ruang yang mengakomodasi lahan usaha budidaya sebagai kawasan khusus yang mendapat perlindungan dari konservasi dan bahaya pencemaran dan c). terbatasnya kebijakan kredit murah dan lunak. Dahuri (2000) menambahkan kelemahan dalam pengelolaan perikanan dipengaruhi oleh aspek teknis, pengambilan kebijakan, aspek hukum dan kelembagaan serta kondisi aspek ekonomi politik yang kurang kondusif.

6. Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan multidimensi yang ditandai dengan keterbelakangan, peningkatan pengangguran, ketimpangan pendapatan, kesenjangan antar golongan penduduk (Sholeh, 2010). Selanjutnya Hadiyanti (2006) menambahkan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial terutama di daerah pedesaan. Persoalan ini tidak dapat diabaikan karena dapat menjadi pemicu berbagai konflik politik atau gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan.

Sutrisno (2001) mengatakan kemiskinan bukan hanya terbatas pada rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sesuai standar, namun juga menyangkut kemungkinan untuk mengembangkan dan melangsungkan kegiatan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup. Raduan *et al.* (2007) menambahkan kemiskinan nelayan disebabkan oleh keterbatasan modal, sistem penangkapan yang tergantung musim, harga jual hasil tangkapan rendah dan permasalahan sistem bagi hasil dalam penangkapan.

Sumodiningrat (1998) mengatakan dibutuhkan strategi tepat dalam mengatasi kemiskinan dengan mengalokasikan sumberdaya, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia. Soegijoko dan Kusbiantoro (1997) menambahkan pendekatan dan pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan dengan pendekatan terarah yang berpihak kepada masyarakat miskin, pendekatan kelompok dalam mengatasi masalah dan pendekatan pendampingan oleh pedamping luar seperti fasilitator, komunikator dan dinamisor.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan dengan cara: a). penajaman konsep yaitu kesepakatan program diberikan kepada rakyat berkembang dan subyek dalam pembangunan serta bersifat menyerap tenaga kerja melalui penciptaan kesempatan kerja (*employment creation*), b). target yaitu pembagian program kepada yang paling miskin (*poor of poor*) dengan santunan sosial dan untuk yang miskin melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sendiri, c). pendampingan yang bertugas mengarahkan, merumuskan, melaksanakan, menikmati dan mengawasi sendiri pembangunannya, d). pengelolaan dana bergulir (*revolving*) melalui lembaga keuangan masyarakat yang fleksibel, e). pengendalian yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan penyempurnaan konsep melalui evaluasi program (Buku Putih Penanggulangan Kemiskinan, 2002).

7. **Konservasi dan Investasi Hijau untuk Perikanan (*Green Investment for Fisheries*) yang Berkelanjutan**

Damanik *et al.* (2006) mengatakan konservasi merupakan pengelolaan sumberdaya hayati secara lestari, sehingga dalam menetapkan dan mengelola kawasan konservasi dibutuhkan kesesuaian tujuan perlindungan dengan pilihan pengelolaan, pemanfaatan dan kepraktisan pengelolaan.

Wuryandani dan Meilani (2011) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilaksanakan secara adil dan merata serta mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan, pihak terkait dengan kegiatan perikanan serta terbinanya kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan. Dalam perencanaan pengelolaan sektor perikanan harus menghindari tumpang tindih pemanfaatan untuk menghindari timbulnya konflik pengelolaan wilayah pesisir (Ginting, 1998).

Syamsury (2013) mengatakan karakteristik pengelolaan perikanan harus mampu menciptakan nilai tambah dengan memaksimalkan efisiensi input dan memaksimalkan output/produk, berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat umum, dan memiliki keunggulan potensi yang berdaya saing.

Green investment for fisheries (GIFF) atau investasi hijau untuk perikanan merupakan salah satu strategi investasi terhadap usaha perikanan tangkap, pengembangan dan pengelolaan hasil perikanan (P2HP) maupun budidaya perikanan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi maksimum, sosial dan ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Masloman, 2010).

Manfaat investasi hijau dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: a). sosial dapat mengurangi kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja, mengurangi potensi konflik dan tersedianya barang dan secara kontinyu, b). fiskal dapat mengurangi kebocoran dana publik, mengurangi distorsi dan penerimaan pemerintah daerah, serta c). lingkungan dapat meningkatkan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan, mengurangi polusi dan terjaminnya ekosistem yang sehat (Syamsury, 2013).

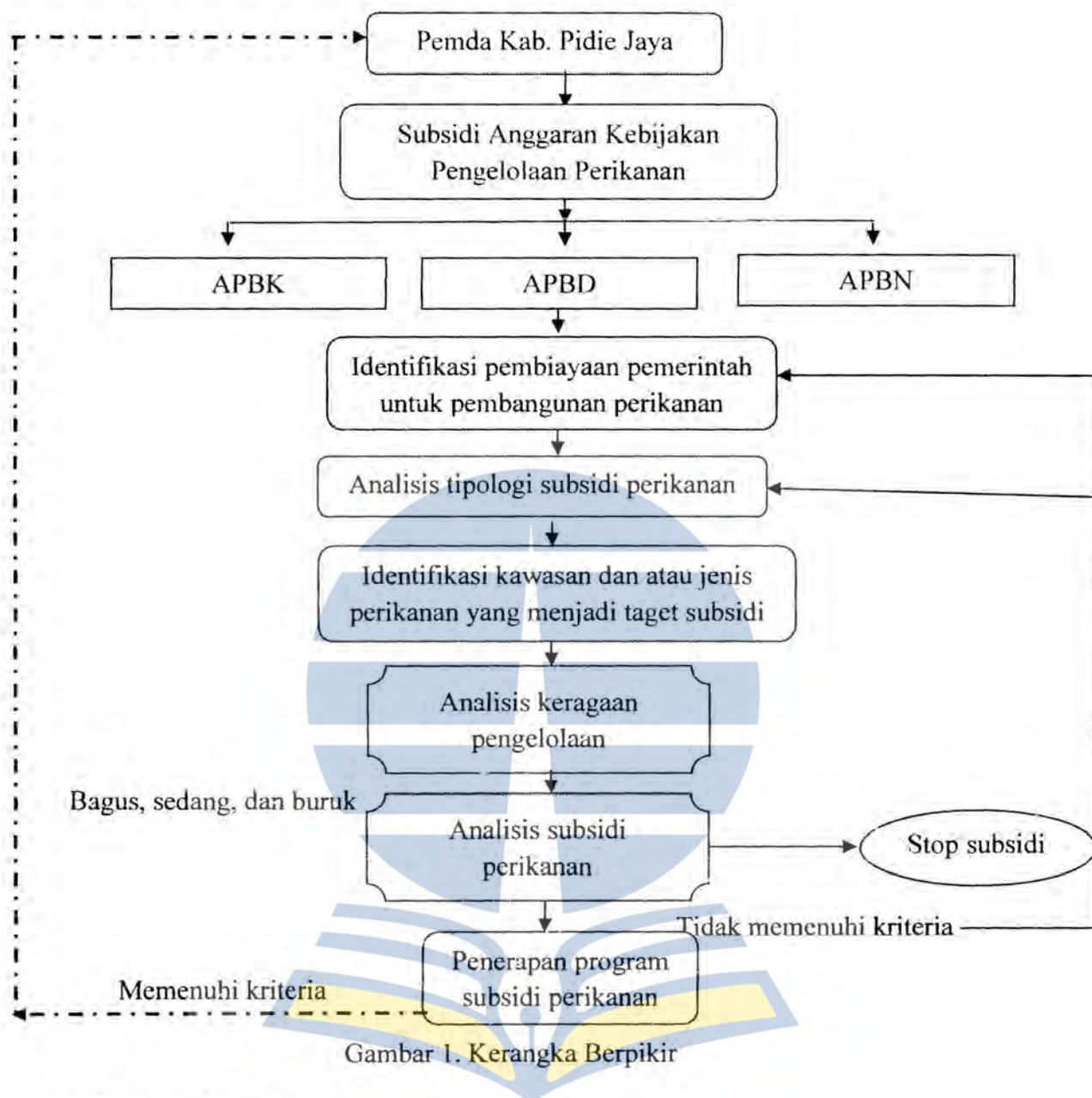
Muchlisin *et al.* (2012b) menambahkan bahwa subsidi perikanan hijau dan berkelanjutan (*sustainable fisheries green investment*) dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan nelayan. Pengembangan perikanan budidaya dapat menyerap tenaga kerja, mendorong perluasan dan kesempatan kerja sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wuryandani dan Meilani, 2011).

B. Kerangka Berpikir

Alokasi anggaran sektor perikanan di Kabupaten Pidie Jaya berperan penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan adanya alokasi anggaran baik yang berasal dari APBK, APBA maupun APBN diharapkan seluruh program dapat lebih mudah diawasi dan dikendalikan. Pengawasan dengan menggunakan anggaran menjadi lebih mudah karena setiap bagian telah memiliki rencana program yang akan dilaksanakan dengan sejumlah dana yang dianggarkan. Jika terdapat penyimpangan akan dengan mudah ditemukan dengan membandingkan antara jumlah aktual dengan yang dialokasikan.

Strategi alokasi subsidi perikanan diharapkan berperan penting dan berdampak positif terhadap pembangunan perikanan. Efektivitas subsidi perikanan ditentukan berdasarkan proses identifikasi pembiayaan pemerintah untuk pembangunan perikanan, tipologi subsidi perikanan dan analisis subsidi perikanan. Berdasarkan hasil analisis subsidi perikanan dikelompokkan menjadi subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*), subsidi yang diperbolehkan (*actinable subsidies*) dan subsidi yang termasuk antara kedua kategori (*non-actionable subsidies*). Jika subsidi bermanfaat maka penerapan subsidi perikanan dilanjutkan, namun apabila pemberian subsidi perikanan cenderung merusak kelestarian sumberdaya perikanan maka subsidi dihentikan.

Evaluasi alokasi anggaran merupakan suatu kebijakan dan prosedur untuk mengevaluasi antara sasaran dan realisasi, evaluasi yang dilakukan secara priodik menjadi proses pengendalian subsidi perikanan dan hasil evaluasi alokasi anggaran menjadi umpan balik bagi pelaksana anggaran di masa yang akan datang. Dengan demikian, subsidi perikanan yang efektif seharusnya merupakan subsidi yang dapat menjaga kelestarian potensi sumberdaya ikan, menjaga kestabilan produksi perikanan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.



Keterangan Gambar :

—————> = Analisis subsidi anggaran yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

- - - - -> = Hasil Penelitian merupakan rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

C. Definisi Operasional

1. Subsidi merupakan alat pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah (Spencer dan Amos, 1993).
2. Subsidi perikanan hijau merupakan berbagai jenis dan bentuk subsidi segala usaha yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perikanan yang diusulkan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui alokasi anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk diserahkan kepada nelayan tradisional yang dibuktikan secara ilmiah bantuan tersebut tidak mengarah pada *over fishing* dan *over capacity* (Schoor, 2012).
3. Efektivitas pemanfaatan subsidi adalah suatu keadaan dimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai, dengan tepat waktu, dan bermanfaat bagi masyarakat.
4. Kemiskinan merupakan kendala pembangunan yang multidimensi, ditandai oleh tingkat keterbelakangan dan kesenjangan antar golongan penduduk, sehingga dapat menimbulkan masalah politik dan sosial di masa depan (Sholeh, 2010).
5. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain dalam kurun waktu satu tahun (Bastian, 2008).

6. Masyarakat perikanan merupakan sekumpulan orang yang tinggal dekat, hidup bersama dan menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya perikanan, baik di perairan laut maupun perairan darat (Surachman, 2011).
7. Perikanan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran dalam suatu bisnis perikanan (Adrianto, 2004).
8. *Green Investment for Fisheries (GIF)* atau investasi hijau untuk perikanan adalah suatu strategi investasi usaha perikanan tangkap maupun budidaya yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang tidak hanya memberikan keuntungan namun harus juga bermanfaat sosial dan ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Masloman, 2010).
9. Investasi hijau merupakan suatu kegiatan yang mendukung penjagaan lingkungan (*environmental stewardship*), perlindungan konsumen, keanekaragaman hayati dan keadilan (Masloman, 2010).
10. Sumberdaya ikan merupakan aset kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi domestik rumah tangga, industri dan sebagai sumber penerimaan negara melalui nilai tambah yang dihasilkan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2013 di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, Bandar Baru Panteraja dan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain korelasional (*ex post facto*) yaitu desain yang merupakan hasil pengukuran suatu peristiwa yang berlangsung.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan tangkap, pengolah dan petani pembudidaya ikan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan sampel penelitian adalah nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah yang menerima subsidi perikanan. Sebagai data pembanding akan dilakukan wawancara kepada beberapa responden yang tidak menerima bantuan. Jumlah responden pembanding adalah 50% dari responden penerima subsidi. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden mampu berkomunikasi dengan baik dan sedang berada di tempat penelitian saat wawancara.

Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 810 orang, yang terdiri dari 536 orang penerima subsidi perikanan dan 274 orang bukan penerima subsidi perikanan dari jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Total Populasi pada Masing-masing Lokasi Penelitian

No	Jenis Responden	Kecamatan							Jumlah
		Mrd	Mda	Jkb	Trg	BB	Ulm	Prj	
A Penerima Subsidi Perikanan									
1	Nelayan	31	15	13	24	75	27	115	300
2	Pembudidaya	20	39	10	51	27	21	22	283
3	Pengolah	6	-	24	5	-	-	11	46
Jumlah		57	54	47	80	102	48	148	536
B Non Penerima Subsidi Perikanan									
1	Nelayan	16	8	7	12	38	14	58	153
2	Pembudidaya	10	20	5	26	14	11	11	97
3	Pengolah	3	-	12	3	-	-	6	24
Jumlah		29	28	24	41	52	25	75	274
Total		86	82	71	121	154	73	223	810

Keterangan: Mrd: Meureudu, Mda: Meurah Dua, Jkb: Jangka Buya, Trg: Trienggadeng BB: Bandar Baru, Ulm: Ulim dan Prj: Panteraja

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *simple random sampling* yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Notoadmodjo (2002), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Besarnya sampel yang diinginkan

N = Populasi penerima subsidi (536)

d = Tingkat kepercayaan (0,1)

Perhitungan:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{536}{1 + 536(0,01)}$$

$$n = \frac{536}{6,36}$$

n = 84,2 dibulatkan menjadi 84

Sehingga dengan demikian total jumlah sampel dalam penelitian adalah 136 sampel yang terdiri dari penerima subsidi 84 sampel dan 42 sampel bukan penerima subsidi. Distribusi jumlah sampel/responden pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan pada Masing-Masing Lokasi Penelitian

Kecamatan	Jumlah Responden		Sampel	
	Penerima Subsidi (orang)	Non Penerima Subsidi (orang)	Penerima Subsidi (orang)	Non Penerima Subsidi (orang)
Meureudu	57	29	$57/536 \times 85 = 9$	5
Meurah Dua	54	28	$54/536 \times 85 = 8$	4
Jangka Buya	47	24	$47/536 \times 85 = 8$	4
Trienggadeng	80	41	$80/536 \times 85 = 13$	7
Bandar Baru	102	52	$102/536 \times 85 = 16$	8
Ulim	48	25	$48/536 \times 85 = 7$	4
Panteraja	148	75	$148/536 \times 85 = 23$	10
Jumlah	536	274	84	42

Tabel 3. Jumlah Kriteria Responden Berdasarkan Kecamatan pada Masing-Masing Lokasi Penelitian

No	Jenis Responden	Kecamatan							Jumlah
		Mrd	Mda	Jkb	Trg	BB	Ulm	Prj	
A	Penerima Subsidi Perikanan								
1	Nelayan	5	3	2	5	12	4	15	46
2	Pembudidaya	3	5	2	7	4	3	5	29
3	Pengolah	1	-	4	1	-	-	3	9
	Jumlah	9	8	8	13	16	7	23	84
B	Non Penerima Subsidi Perikanan								
1	Nelayan	3	1	1	2	6	2	7	22
2	Pembudidaya	1	3	1	4	2	2	2	15
3	Pengolah	1	-	2	1	-	-	1	5
	Jumlah	5	4	4	7	8	4	10	42
	Jumlah Total	14	12	12	20	24	11	33	126

Keterangan: Mrd: Meureudu, Mda: Meurah Dua, Jkb: Jangka Buya, Trg: Trienggadeng BB: Bandar Baru, Ulm: Ulim dan Prj: Panteraja

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka sebagai acuan wawancara dan tidak terstruktur, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun (2009 – 2013), alat tulis lengkap, kamera untuk dokumentasi dan laptop (Lampiran 7).

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai dampak subsidi perikanan bagi nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang terdiri dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) selama 5 tahun (2009 – 2013), jumlah anggaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya serta studi literatur.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, untuk memperoleh data tentang fakta yang ada serta mencari keterangan secara faktual yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian memfokuskan kepada masyarakat yang berhubungan erat dengan pengelolaan kebijakan perikanan yaitu nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah yang berada di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

3. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pengolah, kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya yang digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilaksanakan dengan menemui langsung responden di masing-masing lokasi penelitian dan melakukan wawancara sesuai dengan kuesioner yang telah disiapkan (Lampiran 2), sedangkan wawancara dengan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan langsung di dinas terkait yang berpedoman sesuai dengan matriks kriteria komponen pengelolaan perikanan (Tabel 6).

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selama 5 tahun mulai tahun 2009 – 2013 yang diperoleh melalui bagian Subbag Penyusunan Program, serta studi literatur yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah.

4. Status Subsidi

a. Tahap identifikasi kebutuhan pembangunan perikanan

Identifikasi kebutuhan pembangunan perikanan merupakan kebijakan makro pembangunan kelautan dan perikanan dideskripsikan dan dituangkan sebagai input dari implementasi pembangunan kelautan dan perikanan tahun berjalan yang dilihat dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada empat

bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya, yaitu: bidang budidaya perikanan, tangkap, pengolahan dan pengawasan dari tahun 2009 – 2013.

b. Tahap pembiayaan pemerintah untuk pembangunan perikanan

Pada tahap ini seluruh potensi pembiayaan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang telah diterapkan untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan selama lima tahun berjalan. Seluruh pembiayaan yang telah diidentifikasi khususnya yang berhubungan dengan pembangunan kelautan dan perikanan baik pembiayaan langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect goverment transfer/payment*).

c. Tahap identifikasi tipologi subsidi perikanan

Setiap kegiatan dikelompokkan menurut masing-masing bidang yang mengacu Sumbangan Pemikiran dalam Penyusunan Pedoman Kebijakan Subsidi untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan di Indonesia (WWF, 2013) yaitu ada tiga jenis subsidi, antara lain: subsidi bermanfaat (*beneficial subsidies*), subsidi yang memicu peningkatan kapasitas perikanan (*fisheries capacity enhancing subsidies*) dan subsidi yang tidak jelas dampaknya (*ambiguous subsidies*). Selanjutnya setelah menentukan setiap satuan (mata anggaran) bentuk/subsidi perikanan masuk kategori hijau, kuning, merah (termasuk indikasi +, =, dan -) kemudian dijelaskan dalam bentuk tabel, grafik dan dianalisis secara deskriptif diambil suatu kesimpulan yang direkomendasikan ke Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menentukan kebijakan pengelolaan perikanan sesuai kriteria yang telah disusun (Tabel 4 dan Tabel 5).

Tabel 4. Pedoman Pemberian Subsidi Perikanan Sesuai dengan Kualitas Pengelolaan Kawasan atau Jenis Perikanan yang Menjadi Target Subsidi Perikanan (WWF-Indonesia, 2013)

No	Tipe Subsidi	Kondisi Stok Ikan				
		Full Exploited	Over Exploited	Under Exploited		
				Status Kualitas Manajemen Buruk	Status Kualitas Manajemen Sedang	Status Kualitas Manajemen Baik
1	Pengelolaan perikanan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan
2	MPA, rehabilitasi habitat dan/atau pemuliahn stok ikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan
3	Penelitian dan pengembangan perikanan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan
4	BBM	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan
					boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian
					boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian

Lanjutan Tabel 4.

				boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan
					boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian
				boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	
		boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	
11	Program bantuan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	
12	Program pengembangan masyarakat nelayan			boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	

Lanjutan Tabel 4.

13	<i>Buyback program</i>	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	Tidak ada opsi program subsidi perikanan		
14	Program peningkatan kapasitas nelayan terkait mutu hasil tangkapan (keterampilan dan pengetahuan)	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian			
15	<i>Swap program</i> terkait kapasitas perikanan (kapal kecil ditukar dengan kapal besar)					boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian
16	Program penggantian alat tangkap				boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian (Note: Pembatasan jumlah, kapasitas dan pengelolaan)	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian
		boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian		



Tabel 5. Pedoman Identifikasi Pembiayaan Pemerintah yang Berpotensi Menjadi Subsidi Perikanan

No	Tipe Subsidi	Tujuan dalam Kebijakan subsidi	Contoh pembiayaan pemerintah
1	Pembiayaan pemerintah	Mendukung usaha perikanan	Pembiayaan yang diberikan kepada Perikanan (PUP) (PUP) (PUP)
2	MPA, dan subsidi terhadap pemukiman nelayan	Mendukung usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk meningkatkan produksi perikanan • Subsidi biaya untuk pemukiman dan pemukiman • Pembiayaan pemerintah untuk meningkatkan MPA, baik di sektor perikanan dan perikanan • Pembiayaan pemerintah untuk rehabilitasi perikanan
3	Pembiayaan untuk pengembangan perikanan	Mendukung usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk meningkatkan produksi perikanan • Pembiayaan untuk meningkatkan produksi perikanan
4	Pembiayaan untuk pengembangan perikanan	Mendukung usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk meningkatkan produksi perikanan • Pembiayaan untuk meningkatkan produksi perikanan

Lanjutan Tabel 5



1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.	1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	2. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
3. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	3. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	4. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
5. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	5. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	6. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
7. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	7. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	8. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
9. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	9. Berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
10. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	10. Meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Lanjutan Tabel 5

11	Program bantuan kepada nelayan/pembudidaya dan pengolah	Tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	Insentif pemerintah kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah melalui bantuan langsung tunai
12	Program pengembangan masyarakat nelayan	tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	Pembiayaan pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan (misalnya subsidi sertifikasi aset dan penghasilan) Insentif pemodal perikanan
13	<i>Buyback</i> program	Tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	* Pembiayaan pemerintah untuk membeli input industri perikanan (pembelian kapal perikanan) * Pembiayaan pemerintah untuk membeli kapal bekas IUU Fishing
14	Program peningkatan kapasitas nelayan terkait mutu hasil tangkapan (keterampilan dan pengetahuan)	Tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	* Pembiayaan pemerintah terhadap program keterampilan dan kesadaran nelayan dalam proses handling * Pembiayaan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas infrastruktur handling
15	Swap program kapasitas perikanan (kapal kecil ditukar kapal besar)	Tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	* Insentif pemerintah untuk perubahan ukuran kapal dari ukuran kecil menjadi besar
16	Program penggantian alat tangkap	Tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	* Insentif pemerintah untuk perubahan jenis dan ukuran alat tangkap
17	Dukungan terhadap peningkatan kualitas produk	Tanpa pengendalian mendorong peningkatan kapasitas perikanan	* Pembiayaan langsung untuk mendorong peningkatan kualitas hasil perikanan

Keterangan:

	Subsidi bermanfaat
	Subsidi yang memicu peningkatan kapasitas perikanan (precautionary approach)
	Subsidi yang tidak selalu jelas manfaat dan dampaknya

5. Status kebijakan perikanan hijau

Penentuan penilaian keragaan kebijakan subsidi perikanan terhadap program Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya menggunakan metode pembobotan (*scoring technique*). Total nilai dan kategori kualitas pengelolaan perikanan adalah 1650 yang terdiri dari beberapa parameter kunci kualitas komponen pengelolaan yang terdiri dari kualitas tujuan perikanan, pengumpulan data dan informasi perikanan, ketersediaan dokumen dan perencanaan perikanan, alokasi sumberdaya ikan, proses pengambilan keputusan perikanan, penegakan hukum, dan kelembagaan perikanan. Adapun kriteria dan skor kualitas komponen pengelolaan perikanan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks Kriteria dan skor Komponen Pengelolaan Perikanan

Deskripsi	Rangking	Bobot	Skor	nilai	Skor Kualitas Komponen		
					1	2	3
tujuan kebijakan dan pengelolaan perikanan	4	10			tujuan perikanan tersedia tetapi tidak menganut prinsip-prinsip keberlanjutan perikanan	statement tujuan perikanan hanya mengandung sebagian dari prinsip-prinsip keberlanjutan perikanan	statement tujuan perikanan mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan perikanan
mekanisme, jenis dan kualitas pengumpulan data	7	10			tidak ada data	<i>the best data available</i>	jenis dan kualitas data reliable atau menggunakan <i>optimal the best scientific evidence/ data available</i>
kualitas analisis yang berbasis ilmiah terkait dengan keberlanjutan perikanan	5	10			tidak ada analisis	ada analisis tetapi menggunakan metode yang tidak sesuai dengan keberlanjutan perikanan	analisi tersedia menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah yang terbaik dan memperhitungkan prinsip kehati-hatian dalam mencapai keberlanjutan perikanan
ketersediaan rencana pengelolaan perikanan (RPP)	8	10			tidak ada RPP yang berbasisi spesies atau ada RPP tapi belum memiliki kelengkapan sistem pengelolaan perikanan	RPP tersedia dan sudah memiliki kelengkapan dari sistem pengelolaan perikanan tetapi belum didukung oleh peraturan hukum	RPP tersedia sesuai dengan kelengkapan sistem pengelolaan perikanan dan didukung oleh peraturan hukum
dukungan multi pihak dilibatkan dalam keberlanjutan perikanan	6	10			tidak ada aktivitas konsultasi dalam perencanaan dan evaluasi perikanan	ada aktivitas konsultasi tetapi hanya terbatas di kalangan pemerintah	ada aktivitas konsultasi yang melibatkan pemerintah, <i>civil society</i> dan pengguna sumberdaya

Lanjutan Tabel 6

implementasi kebijakan perikanan efektif dan sesuai dengan perencanaan	2	10		tidak ada implementasi dari RPP	RPP hanya diimplementasikan pada beberapa parameter yang mutlak harus ada berupa <i>fisheries measure, acces, allocation, performance review/indicator</i>	RRP diimplementasikan dengan efektif
alokasi penangkapan adil, tidak melebihi kapasitas, <i>first come first served</i>	3	10		melebihi JTB	tidak melebihi JTB (MEY<JTB<MSY)	tidak melebihi JTB (MEY<JTB<MSY), adil, <i>first come first served</i> basis
legal adoption terkait dengan keberlanjutan perikanan	10	10		tidak ada payung hukum formal maupun informal	parsial: tidak semua kebutuhan kebijakan pengelolaan terpenuhi	semua kebutuhan legal formal terpenuhi
efektifitas dari keputusan tersebut	9	10		tidak ada kegiatan penegakan hukum	<i>at least</i> sudah ada regulasi, belum ada implementasi yang optimal, pelaksanaan pengawasan sampai tahap penyidikan	pengawasan hingga litigasi dengan pemberian sanksi yang setimpal, penegakan hukum yang efektif untuk mencegah <i>overcapacity dan overfishing</i>
efisiensi dan keberadaan piranti struktural pendukung	1	10		<i>instructive governance approach</i>	<i>consultative governance approach</i>	<i>collaborative governance approach</i> melalui pemebntukan lembaga pengelolaan yang formal

Matriks total nilai dan kualitas pengelolaan kawasan atau jenis perikanan:

Kategori kualitas pengelolaan perikanan	Total nilai
Buruk	550 - 915
Sedang	916 - 1235
Baik	1236 - 1650

6. Efektivitas Pemanfaatan Subsidi Non BBM

Efektifitas pemanfaatan subsidi non BBM ditentukan berdasarkan hasil kuisioner yang meliputi jenis bantuan, kesesuaian dan pemanfaatan bantuan, peningkatan produksi, masalah, ketepatan sasaran penerima subsidi dan jenis subsidi yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga gambaran subsidi perikanan ditinjau dari aspek teknologi, sosial, sumberdaya ikan dan kelembagaan dapat terjawab.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis univariat untuk menjelaskan variabel penelitian dengan penyajian dalam tabel dan grafik. Selanjutnya menentukan status subsidi di analisis secara deskriptif dan ditarik suatu kesimpulan sebagai rekomendasi dalam hal kebijakan subsidi perikanan di Kabupaten Pidie Jaya.

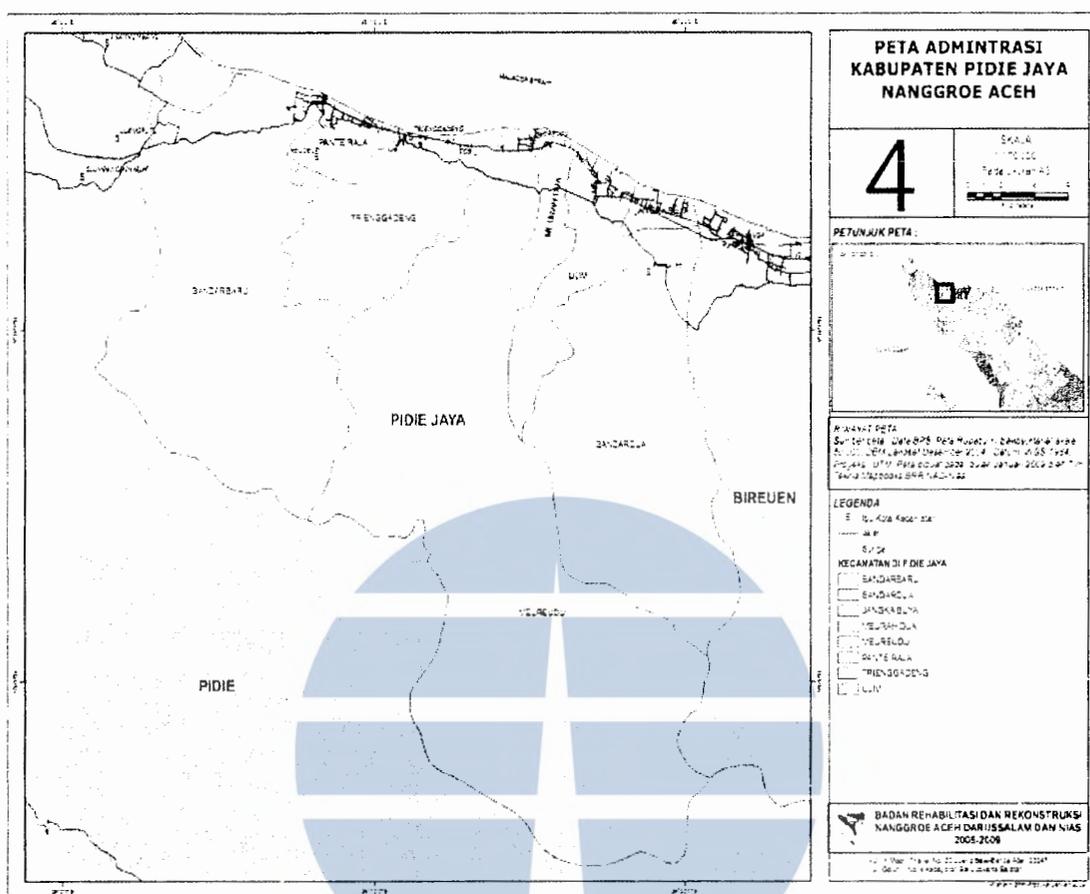
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten yang terbentuk pada 15 Juni 2007 hasil pemekaran dari Kabupaten Pidie berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya. Secara geografis Kabupaten Pidie Jaya berada pada posisi $04^{\circ}06'$ - $04^{\circ}47'$ Lintang Utara dan $95^{\circ}52'$ - $96^{\circ}30'$ Bujur Timur. Dengan luas daerah $1.162,84 \text{ km}^2$, terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan, 34 mukim, serta 222 desa. Kabupaten Pidie Jaya berbatasan sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pidie, sebelah Timur dengan Kabupaten Bireun, dan sebelah Barat berbatasan Kabupaten Pidie (Gambar 2).

Kecamatan Jangka Buya merupakan wilayah terkecil yaitu $33,47 \text{ km}^2$ (2,88%) dari total wilayah kabupaten dan Kecamatan Meurah Dua merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah sekitar $307,85 \text{ km}^2$ (26,47%), lebih jelas luas wilayah per masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 7.



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

Tabel 7. Luas Wilayah Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh

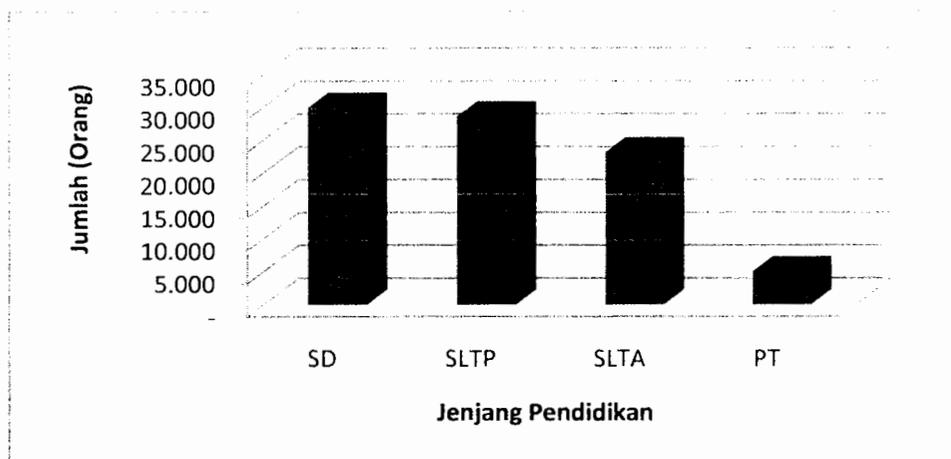
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Persentase (%)
1	Bandar Dua	172,00	14,79
2	Jangka Buya	33,47	2,88
3	Ulim	64,67	5,56
4	Meurah Dua	307,85	26,47
5	Meureudu	143,96	12,38
6	Trienggadeng	119,94	10,31
7	Panteraja	52,39	4,51
8	Bandar Baru	268,56	23,1
Total		1162,84	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

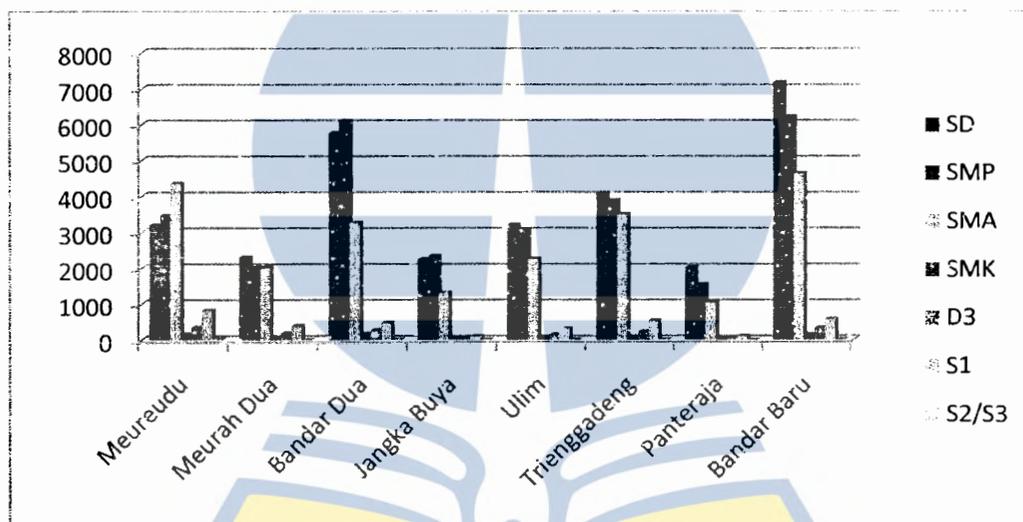
Jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 berjumlah 138.415 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan. Penduduk laki-laki berjumlah 67.584 jiwa (48,83%) dan perempuan 70.831 jiwa (51,17%), dengan demikian rasio/perbandingan jenis kelamin hampir seimbang. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 117 orang perkilometer persegi. Kecamatan Jangka Buya merupakan kecamatan terpadat penduduknya sekitar 260 orang per km², disusul Kecamatan Ulim 206 orang per km². Sebaliknya wilayah paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Meurah Dua yang hanya didiami oleh 33 orang per km².

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Semakin banyak manusia sebagai subjek pembangunan mengenyam jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan memegang peranan penting bagi pergerakan roda pembangunan. Seringkali tingkat pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan seseorang dalam bidang tugasnya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki maka semakin tinggi derajat sosialnya (Gaffar, 2001).

Komposisi jumlah penduduk menurut usia sekolah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 didominasi pada tingkatan sekolah dasar yaitu sebanyak 30.039 orang (34,54%) diikuti tingkat sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 28.676 orang (32,97%), sekolah lanjutan tingkat atas 23.199 orang (26,68%) dan untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi hanya 5.054 orang (5,71%).



Gambar 3. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013



Gambar 4. Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa Kecamatan Bandar Baru mendominasi tingkat partisipasi sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Namun Kecamatan Meureudu mendominasi tingkat perguruan tinggi baik D3, S1 maupun S2 artinya Kecamatan Meureudu tingkat pendidikannya lebih baik daripada Kecamatan lain di Pidie Jaya.

Partisipasi penduduk yang di lapangan kerja dipengaruhi oleh faktor keterampilan, kondisi alam maupun situasi ekonomi di suatu daerah. Indonesia sampai saat ini masih merupakan Negara Agraris yang sebahagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, meskipun dari tahun ke tahun persentasenya semakin berkurang dan diserap oleh sektor-sektor lain seperti perdagangan dan industri. Begitu pula Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti daerah lain (Badan Pusat Statistik, 2013).

Tahun 2013 persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Pidie Jaya sebesar 62,55% atau sekitar 90.969 jiwa. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2013 persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 66,09% atau sekitar 60.121 jiwa, untuk dapat melihat sejauh mana setiap lapangan usaha menyerap tenaga kerja, maka lapangan usaha dapat dibagi atas sektor-sektor sebagai berikut: (a) Sektor pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), (b) Industri pengolahan, (c) Perdagangan dan jasa (perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan/restoran dan hotel), (d) Jasa kemasyarakatan dan (e) Lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan Jasa Perusahaan).

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 paling banyak terserap dalam lapangan usaha pertanian mencapai 51%, dilanjutkan dengan perdagangan dan jasa 18%, jasa kemasyarakatan 12%, industri pengolahan 9% dan lainnya 10%. Dengan banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang terserap dalam sektor pertanian,

menandakan bahwa potensi ekonomi yang mendukung pendapatan Kabupaten Pidie Jaya masih didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan.

2. Potensi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

a. Perikanan Tangkap

Nelayan di Kabupaten Pidie Jaya dikelompokkan atas dua kategori yaitu nelayan tetap dan sambilan, total jumlah nelayan 2.303 orang yang terdiri dari 1.878 nelayan tetap dan 425 nelayan sambilan masing-masing tersebar dalam 7 kecamatan (Tabel 8).

Tabel 8. Sebaran Kategori Nelayan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Kategori Nelayan		Jumlah (orang)
		Nelayan Tetap (orang)	Nelayan Sambilan (orang)	
1	Bandar Baru	96	25	121
2	Panteraja	458	81	539
3	Trienggadeng	236	110	346
4	Meureudu	320	65	385
5	Meurah Dua	255	59	314
6	Ulim	198	36	234
7	Jangka Buya	315	49	364
Jumlah Total		1.878	425	2.303

Sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah nelayan paling banyak berada di Kecamatan Panteraja (23,40%) diikuti Kecamatan Meureudu (16,72%) dan Kecamatan Trienggadeng (15,02%), serta yang paling rendah di Kecamatan Bandar Baru (5,25%). Jumlah nelayan tetap di Kecamatan Panteraja paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya mencapai 24,39% disusul Kecamatan Meureudu dan Jangka Buya masing-masing 17,04% dan 16,77%. Jumlah nelayan sambilan paling banyak dijumpai di Kecamatan

Trienggadeng (25,88%), Kecamatan Panteraja (19,06%) dan terendah di Kecamatan Bandar Baru (5,88%).

Jumlah kapal penangkapan ikan tercatat 741 unit armada, yang didominasi oleh kapal berkapasitas kecil (0 - 5 GT) sebanyak 370 unit (50%) dan sampan mesin sebanyak 283 unit (38%) dari total armada penangkapan. Sebaran jumlah kapal motor ukuran 0 - 5 GT terbanyak ditemukan di Kecamatan Meureudu yaitu 129 unit (34,86%) dan Kecamatan Panteraja sebanyak 74 unit (20%), sedangkan sebaran sampan mesin paling banyak dijumpai di Kecamatan Jangka Buya sebanyak 90 (31,8%) unit dan Kecamatan Trienggadeng 61 unit (21,55%) seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Sebaran Armada Penangkapan Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Ukuran kapal (unit/GT)					Sampan Mesin (unit)	Perahu tanpa motor (unit)	Jumlah
		<5	6-10	11-20	20-30	>30			
1	Bandar Baru	29	-	-	-	-	27	-	56
2	Panteraja	74	27	18	-	-	40	1	160
3	Trienggadeng	57	1	-	-	-	61	2	121
4	Meureudu	129	-	1	-	8	-	1	139
5	Meurah Dua	40	-	-	4	3	40	-	87
6	Ulim	35	9	-	-	-	25	2	71
7	Jangka Buya	6	7	-	-	-	90	2	105
Jumlah		370	44	19	4	11	283	10	741

Sumber: Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Sampai saat ini armada penangkapan yang berukuran 21 – 30 GT hanya 4 unit terdapat di Kecamatan Meureudu. Demikian juga ukuran 31 – 50 GT hanya ada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Meureudu delapan unit (72,73%) dan Kecamatan Meurah Dua tiga unit (27,27%). Ditinjau dari penyebaran jenis armada penangkapan, ukuran kapal 0 – 5 GT, sampan mesin dan perahu tanpa motor

tersebar hampir semua kecamatan kecuali armada >11 GT hanya ada di beberapa kecamatan.

Jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan di Kabupaten Pidie Jaya adalah pancing tonda 175 unit (22%), pancing rawai 150 unit (19%) dan jaring insang (*gill net*) 149 unit (18%). Jenis alat tangkap tersebut paling banyak ditemukan di Kecamatan Meureudu (Tabel 10). Hal ini berbanding lurus dengan jumlah armada penangkapan yang lebih banyak di kecamatan tersebut.

Tabel 10. Jenis Alat Menangkap Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Alat Tangkap (Unit)							
		<i>Purse Saine</i>	<i>Purse mini</i>	<i>Tramel net</i>	<i>Gill net</i>	Pancing tonda	Pancing rawai	Pancing ulur	Pukat pantai
1	Bandar Baru	-	-	-	5	29	16	-	-
2	Panteraja	-	45	30	27	10	-	32	2
3	Trienggadeng	-	-	32	29	21	32	-	1
4	Meureudu	11	1	10	-	80	-	47	1
5	Meurah Dua	6	1	32	23	35	15	30	-
6	Ulim	-	9	25	25	-	35	-	4
7	Jangka Buya	-	7	-	40	-	52	-	2
	Jumlah	17	63	129	149	175	150	109	10
	Jumlah total					802			

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Penyebaran alat tangkap hampir merata di setiap kecamatan, kecuali alat tangkap *pursesaine* hanya ada di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua. Jumlah alat tangkap paling banyak ditemukan di Kecamatan Meureudu 150 unit (18,70%), diikuti Kecamatan Panteraja 146 unit (18,20%) dan Kecamatan Meurah Dua 142 unit (17,71%). Kecamatan Bandar Baru merupakan kecamatan paling sedikit memiliki alat tangkap yaitu 60 unit (6,23%), sesuai dengan jumlah armada yang hanya 50 unit.

Secara umum hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pidie Jaya didominasi ikan teri, tongkol, cakalang, dencis, dan tuna. Total jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada Tahun 2013 adalah 10.641 ton (Tabel 12) yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tersebar pada masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya, dimana sebahagian besar didaratkan di Kecamatan Panteraja, Meureudu, Ulim dan Meurah Dua (Tabel 11).

Tabel 11. Sebaran Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan tempat Pelelangan Ikan (TPI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Lokasi		Keterangan
		Nama PPI	Nama TPI	
1	Meureudu	PPI Mns. Balek	TPI Mns. Balek	Utama
2	Bandar Baru	-	TPI Lancang	-
3	Panteraja	PPI Kuala Panteraja	TPI Kuala Panteraja	Pendamping
4	Trienggadeng		TPI Kuala Pangwa	
5	Ulim		TPI Tanjong Ulim	
6	Jangka Buya		TPI Pasi Aron TPI Kuala Kiran	
7	Meurah Dua		TPI Mns. Jurong	

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 12. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Jenis ikan	Volume Produksi (Ton)							Jumlah
		BB	Prj	Trg	Mrd	Mda	Ulm	Jkb	
1	Teri	-	1300	110	35	-	210	520	2.175
2	Dencis	-	435	-	475	300	523	220	1.953
3	Tongkol	140	350	43	375	350	243	142	1.643
4	Peperek	10	20	16	-	10	39	23	118
5	Tuna	200	34	95	980	850	-	-	2.159
6	Cakalang	75	-	53	850	450	-	10	1.438
7	Tenggiri	16	35	37	25	11	18	12	154
8	Layur	-	5	12	-	-	7	8	32
9	Turisi	55	10	27	-	-	28	12	132
10	Kuwe	70	17	16	27	29	24	20	203
11	Kembung	15	120	22	85	45	50	56	393
12	Lamadang	5	-	4	85	32	-	-	126
13	Kakap	-	-	-	75	42	-	-	117
14	Udang	-	14	4	-	20	-	-	38
Jumlah		586	2.340	439	3.012	2.139	1.142	1.023	10.681

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Keterangan: BB: Bandar Baru, Prj: Panteraja, Trg: Trienggadeng, Mrd: Meureudu, Mda: Meurah Dua, Ulm; Ulim dan Jkb: Jangka Buya

Berdasarkan Tabel 12 terlihat jenis ikan yang banyak tertangkap selama tahun 2013 di Kabupaten Pidie Jaya adalah ikan teri 2.175 ton (20,36%), ikan tuna 2.159 ton (20,21%), dencis 1.953 ton (18,28%), cakalang 1.838 ton (17,21%) dan tongkol 1.643 ton (15,38%). Produksi hasil tangkapan paling banyak di Kecamatan Meureudu sebesar 3.012 ton (28%), Kecamatan Panteraja 2.340 ton (22%) dan Kecamatan Meurah Dua 2.139 ton (20%).

b. Perikanan Budidaya

Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari budidaya air payau dan air tawar, dari keduanya kegiatan budidaya air payau lebih dominan dengan total luas lahan tambak Tahun 2013 mencapai 2.076,23 Ha (Tabel 13) yang tersebar dalam tujuh kecamatan. Sedangkan kegiatan budidaya air tawar tersebar pada delapan kecamatan (Tabel 14). Namun demikian, Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki potensi perairan umum yang dapat dikembangkan untuk lahan budidaya air tawar, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 13. Luas Areal Potensial Budidaya dan Pemanfaatannya di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Jenis budidaya	Potensi (Ha)	Areal produktif (Ha)	Lahan telantar (Ha)	Pemanfaatan (%)
1	Tambak	2.076,23	1.548,45	528,78	74,6
2	Kolam	49,82	35,54	14,28	71,35
3	Perairan umum	69,35	-	69,35	-
Jumlah		2.197,40	1.584,99	612,4	-

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 14. Luas Lahan Budidaya Tambak dan Kolam Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas lahan Air Payau (Ha)		Luas Lahan Air Tawar (Ha)	
		Prokduktif	Non produktif	Produktif	Non produktif
1	Jangka Buya	133	38,15	2,52	0,6
2	Ulim	229	80,8	4,21	2,13
3	Meurah Dua	78,1	4,25	5,77	2,99
4	Meureudu	104	13,9	2,23	1,37
5	Trienggadeng	198	44,56	1,75	1,37
6	Panteraja	69,55	22,81	4	1,2
7	Bandar Baru	737,8	324,31	5,34	2,68
8	Bandar Dua	-	-	9,72	1,94
Jumlah		1.549,45	528,78	35,54	14,28

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 14, tambak terluas di Kecamatan Bandar Baru mencapai 51,11%, Kecamatan Ulim dan Trienggadeng terbesar kedua dan ketiga masing-masing 14,91% dan 11,67%. Sedangkan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan, kolam terluas di Kecamatan Bandar Dua mencapai 23,40%, Kecamatan Meurah Dua (17,58%) dan Kecamatan Bandar Baru (16,10%) serta luas wilayah terendah di Kecamatan Jangka Buya (5,26%).

Secara umum kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pidie Jaya merupakan kegiatan sambilan saja, berbeda dengan budidaya air payau yang merupakan mata pencaharian utama pembudidaya ikan. Total pembudidaya air payau 2.158 orang dan pembudidaya air tawar 453 orang yang tersebar di delapan Kecamatan (Tabel 15).

Tabel 15. Sebaran Jumlah Pembudidaya Ikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Pembudidaya ikan (orang)	
		Payau	Tawar
1	Bandar Baru	950	73
2	Panteraja	111	29
3	Trienggadeng	311	42
4	Meureudu	118	83
5	Meurah Dua	112	68
6	Ulim	361	60
7	Jangka Buya	195	8
8	Bandar Dua	-	90
Jumlah		2.158	453

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Kecamatan Bandar Baru merupakan kecamatan yang paling banyak pembudidaya air payau mencapai 44,02%, hal ini didukung oleh luasnya lahan yang tersedia di kecamatan ini. Jumlah pembudidaya air tawar terbanyak terdapat

di Kecamatan Bandar Dua (19,87%), diikuti Kecamatan Meureudu dan Bandar Baru masing-masing 18,32% dan 16,11%.

Jenis komoditi utama budidaya air payau terdiri dari udang windu (*Penaeus monodon*), udang vaname (*Penaeus vannamei*) dan bandeng (*Chanos chanos*). Jenis komoditi budidaya air tawar hanya ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dan lele dumbo (*Clarias gariepinus*). Khusus budidaya udang vaname di Kabupaten Pidie Jaya baru berkembang selama tahun 2013 (Tabel 16).

Tabel 16. Jumlah Produksi Budidaya Berdasarkan Komoditas di Kabupaten Pidie Jaya

No	Jenis Ikan	Nama Ilmiah	Jumlah (Kg)	Persentase (%)
1	Udang windu	<i>Penaeus monodon</i>	161.732	17,16
2	Udang Vaname	<i>Penaeus vannamei</i>	57.833	6,14
3	Bandeng	<i>Chanos chanos</i>	507.786	53,87
4	Kakap	<i>Lutjanus sp</i>	80	0,01
5	Nila	<i>Oreochromis niloticus</i>	140.288	14,88
6	Lele	<i>Clarias gariepinus</i>	11.960	1,27
7	Ikan Lainnya		62.930	6,68
Jumlah			942.609	100

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

c. Pengolahan

Kegiatan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pidie Jaya lebih dominan pada pengolahan ikan teri dengan sentra utama unit pengolahan ikan (UPI) yang tersebar di Kecamatan Panteraja, Trienggadeng, Meureudu dan Jangka Buya (Tabel 17), terlihat bahwa sentra pengolahan teri paling banyak di Kecamatan Panteraja (60,61%), Kecamatan Panteraja (31,82%) dan Kecamatan Trienggadeng (7,56%). Sedangkan jenis usaha bandeng tanpa duri hanya ada di

Kecamatan Trienggadeng serta pengolahan kerupuk ikan berada di Kecamatan Meureudu.

Tabel 17. Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Usaha		
		Pengolahan teri (unit)	Bandeng tanpa duri (orang)	Kerupuk ikan (orang)
1	Panteraja	40	-	-
2	Trienggadeng	5	10	-
3	Meureudu	-	-	10
4	Jangka Buya	21	-	-
Jumlah		66	10	10

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah pengolah ikan paling banyak tersebar di Kecamatan Panteraja (46,24%) dan paling rendah di Kecamatan Meureudu (5,78%) dapat dilihat pada Tabel 18. Sedangkan tenaga kerja pemasaran tersebar dalam delapan kecamatan, sebaran paling banyak di Kecamatan Meureudu (26%), Kecamatan Panteraja (24%), Kecamatan Bandar Baru dan Trienggadeng masing-masing 15% serta yang terendah di Kecamatan Bandar Dua hanya 4% (Tabel 19). Hasil produksi pengolahan ikan di Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh pengolahan teri mencapai 69,96% , pengasinan ikan 15,02%, pengolahan kerupuk ikan (8,14%) dan pengolahan bandeng tanpa duri (6,88%) seperti pada Tabel 20.

Tabel 18. Jumlah Pengolah Ikan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah tenaga kerja (orang)	Persentase tenaga kerja (%)
1	Panteraja	80	46,24
2	Trienggadeng	20	11,56
3	Meureudu	10	5,78
4	Jangka Buya	63	36,42
Jumlah		173	100

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 19. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Sebaran Tenaga Kerja (%)
1	Bandar Baru	80	15
2	Panteraja	122	24
3	Trienggadeng	77	15
4	Meureudu	135	26
5	Meurah Dua	28	5
6	Ulim	26	5
7	Jangka Buya	34	7
8	Bandar Dua	19	4
Jumlah		519	100

Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Tabel 20. Jumlah Produksi Hasil Pengolahan Ikan di Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2013

No	Jenis Usaha	Jumlah (Kg)
1	Pengolahan Teri	1.676,54
2	Pengolahan Bandeng Tanpa duri	165
3	Pengolahan Kerupuk ikan	195
4	Pengasinan ikan	360
Jumlah		2.396,54

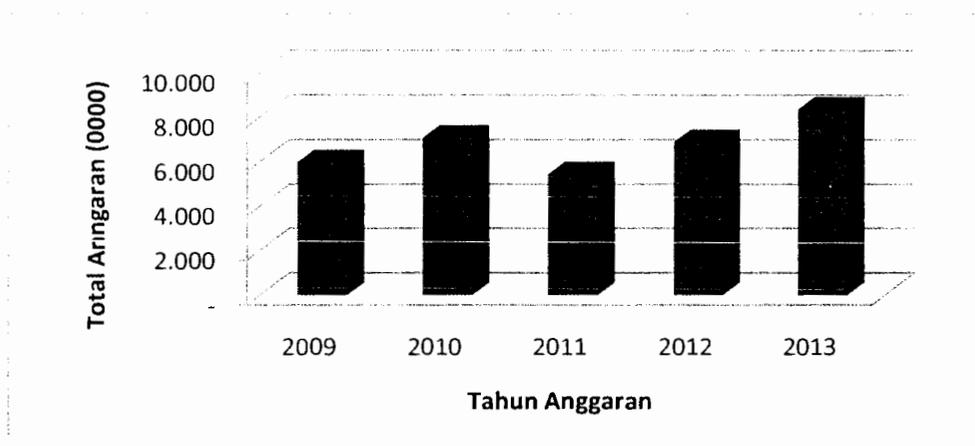
Sumber : Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

B. Pembahasan

1. Keragaan Subsidi

Alokasi anggaran umum di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2009 total anggaran Rp.5.987.578.694,- meningkat menjadi Rp. 7.084.277.554,- pada tahun 2010, namun pada tahun 2011 dan 2012 alokasi anggaran menurun serta meningkat kembali pada tahun 2013 (Tabel 21). Peningkatan dan penurunan alokasi anggaran ditentukan berdasarkan usulan kegiatan yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan legislatif, target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) serta bantuan dana hibah dan sosial baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

Alokasi anggaran yang digunakan di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari anggaran belanja tidak langsung dan langsung. Alokasi belanja tidak langsung diberikan untuk gaji pegawai, tunjangan prestasi kerja (TPK) pegawai, biaya konsumsi, pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta belanja kebutuhan kantor lainnya. Alokasi anggaran belanja langsung selanjutnya dibagi sesuai proporsi masing-masing bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya yaitu: 1) bidang perikanan budidaya, 2) bidang pengelolaan perikanan tangkap dan pesisir pantai, 3) bidang pengawasan, pengendalian mutu dan sumberdaya kelautan dan perikanan serta 4) bidang pengembangan usaha dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (Tabel 21). Secara umum proporsi subsidi perikanan sebagian besar diberikan untuk bidang perikanan budidaya, alokasi anggaran tertinggi tahun 2010 mencapai 69,50%, bidang tangkap alokasi tertinggi mencapai 33,48% pada Tahun 2012 (Tabel 22).



Gambar 5. Total Alokasi Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2013



Tabel 21. Total Penerimaan dan Belanja di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 - 2013

Total Penerimaan	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Belanja tidak langsung	1.070.633.088	1.182.804.604	1.254.193.251	1.726.373.654	1.867.584.536
Belanja langsung	4.916.945.606	5.901.472.950	4.198.288.618	5.171.165.150	6.500.817.503
Total Belanja Daerah	5.987.578.694	7.084.277.554	5.452.481.869	6.897.538.804	8.368.402.039

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya

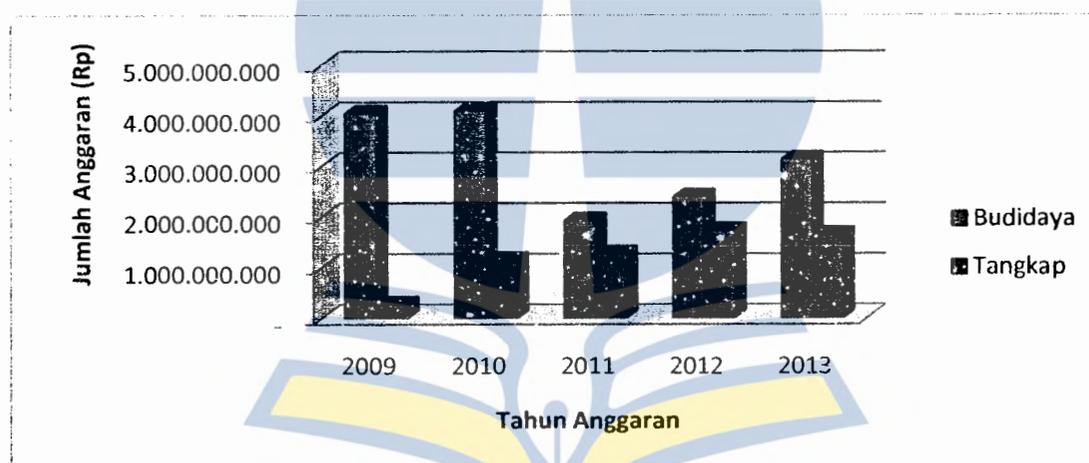
Tabel 22. Total Alokasi Anggaran Belanja Langsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 - 2013

Bidang	Tahun Anggaran									
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah (Rp)	(%)								
Budidaya	4.052.545.807	82,42	4.101.383.256	69,50	1.928.613.727	45,94	2.397.339.692	46,36	3.146.839.165	48,41
Tangkap	279.558.000	5,69	1.154.186.364	19,56	1.275.100.000	30,37	1.731.352.100	33,48	1.649.726.000	25,38
Pengawasan	10.000.000	0,20	-	-	22.000.000	0,43	12.550.000	0,24	247.596.547	3,81
Pengolahan	-	-	-	-	220.000.000	5,24	185.350.650	3,58	680.090.000	10,46
Jumlah	4.342.103.807	88,31	5.255.569.620	89,06	3.445.713.727	81,98	4.326.592.442	83,67	5.724.251.712	88,05

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya

2. Bidang perikanan tangkap dan konservasi

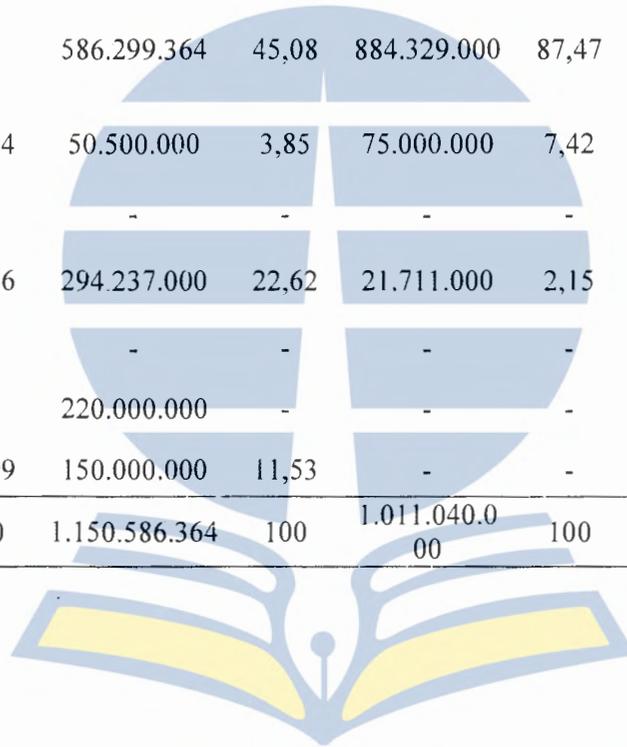
Secara umum alokasi anggaran untuk perikanan tangkap lebih rendah dibandingkan dengan perikanan budidaya (Gambar 6). Setiap tahun alokasi anggaran perikanan tangkap mengalami peningkatan, kecuali tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 total alokasi anggaran perikanan tangkap hanya 5,69% dari total belanja langsung dan meningkat drastis tahun 2010 mencapai 412,86% dari tahun sebelumnya atau 19,56% dari total anggaran, tahun 2011 dan 2012 meningkat lagi masing-masing 30,37% dan 33,48%. Pada tahun 2013 sedikit menurun menjadi 25,38% (Tabel 22).



Gambar 6. Alokasi Anggaran Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2009 - 2013

Tabel 23. Alokasi Anggaran Bidang Perikanan Tangkap sesuai jenis bantuan Tahun 2009 – 2013

Jenis Bantuan	Tahun Anggaran (Rp)									
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Pengadaan alat tangkap	11.600.000	4,81	-	-	30.000.000	2,97	309.125.000	19,4	631.281.000	43,27
Pengadaan / perbaikan TPI/PPI dan infrastruktur lainnya	-	-	586.299.364	45,08	884.329.000	87,47	685.709.100	43	347.500.000	23,82
Perencanaan dan konsultasi pengawasan	50.000.000	20,74	50.500.000	3,85	75.000.000	7,42	103.161.000	6,47	98.845.000	6,78
Pengadaan armada tangkap	-	-	-	-	-	-	150.000.000	9,41	10.000.000	0,69
Rehab/pembangunan/program pengembangan	85.482.000	35,46	294.237.000	22,62	21.711.000	2,15	49.800.000	3,12	266.800.000	18,29
Pengadaan mesin perikanan	-	-	-	-	-	-	296.657.000	18,6	104.500.000	7,16
Pengadaan alat pendingin ikan	-	-	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan rumpon tuasan	94.000.000	38,99	150.000.000	11,53	-	-	-	-	-	-
Jumlah	241.082.000	100	1.150.586.364	100	1.011.040.000	100	1.594.452.100	100	1.458.926.000	100



Selama kurun waktu 2009 – 2013 sebagian besar alokasi anggaran bidang perikanan tangkap lebih diprioritaskan pada kegiatan pengadaan/perbaikan/pengembangan infrastruktur PPI dan TPI, misalnya tahun 2013 alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai 43,27%. Pengadaan alat tangkap dan kegiatan rehab/pembangunan/program pengembangan merupakan kegiatan terbesar kedua dan ketiga yang menyerap alokasi bidang perikanan tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya masing-masing mencapai 87,47% tahun 2011 dan 35,46% tahun 2010 (Tabel 24).

Jenis alat tangkap yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya kepada nelayan terdiri dari pukot pantai, jaring insang, jaring udang, pancing tonda, *purse seine mini*, pancing ulur dan pancing rawai. Persentase anggaran untuk pemberian alat tangkap terbanyak tahun 2013 mencapai 43,27%, sedangkan terendah pada tahun 2011 yaitu 2,97%.

Secara umum terlihat bahwa alat tangkap yang diberikan kepada nelayan di Kabupaten Pidie Jaya termasuk kategori ramah lingkungan karena memiliki selektifitas dalam menangkap ikan dengan ukuran yang kurang lebih sama, tidak merusak habitat ikan dan organisme lainnya, tidak membahayakan nelayan dalam menangkap ikan dan konsumen yang mengkonsumsi ikan serta diterima secara sosial menguntungkan secara ekonomi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum Adat Laot.

Menurut Wiyono (2005) bahwa penggunaan teknologi penangkapan ramah lingkungan dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan secara keberlanjutan karena tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti merusak dasar perairan, dampak terhadap *bio-diversity* dan target komposisi hasil

tangkapan serta ikan tangkapan non target yang kurang termanfaatkan. Latuconsina (2010) menambahkan pengoperasian alat tangkap harus menjawab tiga dampak yaitu terhadap lingkungan, kelimpahan sumberdaya dan target sumberdaya ikan.

Menurut petunjuk teknis Dirjen Perikanan Tangkap (2005) indikator penangkapan ikan ramah lingkungan adalah: tidak menangkap di daerah kawasan terlarang seperti kawasan konservasi, tidak menangkap spesies yang dilindungi, mempertahankan keanekaragaman hayati, tidak merusak lingkungan fisik perairan, tangkapan berkualitas tinggi dan hasil tangkapan sampingan rendah.

Berdasarkan jenis subsidi terlihat bahwa penambahan armada tangkap lebih difokuskan pada berukuran kecil, sehingga kawasan penangkapannya hanya di daerah pesisir. Hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang disetujui pemerintah sangat terbatas dan dikhawatirkan dapat menimbulkan *over fishing* di wilayah pesisir, oleh karena itu pemberian kapal kapasitas kecil perlu dibatasi dan dialokasikan kapal yang berukuran besar. Sehingga dapat menjangkau *fishing ground* yang lebih jauh dan tidak tertumpuk di kawasan pesisir.

Laka (2003) mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengembangan sektor perikanan, salah satunya menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan usaha perikanan seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi, mendaratkan hasil tangkapan, dan menjamin pemasaran, sehingga poses produksi sampai pemasarannya berjalan lancar. Menurut Muchlisin *et al.* (2012,b) bahwa pengadaan kapal besar yang dapat menjangkau kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mungkin dapat mengatasi masalah penangkapan di daerah pesisir.

Sejauh ini untuk program konservasi hanya dialokasikan $\pm 5\%$ dari total anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2010 berupa pembangunan *hatchery* konservasi penyu di Balai Benih *Multy Species Fish* (BBMSF) Trienggadeng, walaupun masih rendah setidaknya merupakan suatu hal positif dalam kegiatan konservasi di Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap sampai Tahun 2013 memang belum dialokasikan kembali anggaran untuk kegiatan konservasi, alokasi anggaran lebih difokuskan untuk program kegiatan pengembangan/pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu pengetahuan pentingnya peranan konservasi kawasan masih kurang dipahami, bahkan seperti konservasi kawasan mangrove terdapat beberapa instansi terkait yang mengklaim kawasan tersebut sehingga dalam penyusunan anggaran terjadi tarik ulur antar instansi.

Kegiatan konservasi di Kabupaten Pidie Jaya sampai saat ini belum efektif, seperti bangunan *hatchery* konservasi penyu belum dimanfaatkan secara optimal. Sebelumnya terdapat dua ekor penyu yang diserahkan masyarakat, namun kini telah dilepas lagi ke habitatnya dan kondisi *hatchery* tersebut terbengkalai. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem perencanaan dan pelaksanaannya belum melibatkan *stakeholder* lainnya. Selain itu kendala utama dalam pengembangan konservasi penyu di Kabupaten Pidie Jaya adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional, sehingga diharapkan untuk pengembangan konservasi di masa yang akan datang perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan cara mengikuti pelatihan dan studi banding ke daerah lain.

Menurut Bengen (2002) bahwa upaya konservasi dapat melindungi berbagai ancaman degradasi yang ditimbulkan akibat aktivitas pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Winata dan Yuliana (2010) menambahkan kegiatan konservasi harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi. Ujung tombak penerapan konservasi adalah masyarakat pesisir yang langsung berhubungan dengan pengelolaan laut (Nikijuluw, 2002).

Menurut Pontoh (2011) ada lima komponen utama dalam penerapan konservasi yaitu: 1) peningkatan kesadaran masyarakat, 2) pengelolaan berbasis kemasyarakatan, 3) penguatan kelembagaan, 4) penelitian, monitoring dan evaluasi serta 5) penegakan hukum. Oleh karena itu ke depan penyusunan rencana dan pelaksanaan konservasi sumberdaya ikan di Kabupaten Pidie Jaya harus mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas.

Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menentukan kebijakan alokasi anggaran bidang perikanan tangkap di masa yang akan datang dalam hal bantuan pengadaan armada tangkap harus mengutamakan perbaikan kapal yang rusak dan diberikan kepada kelompok nelayan yang memiliki komitmen pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Namun apabila dalam mengalokasikan anggaran kedepan dipandang perlu pengadaan kapal berukuran besar (>30GT), maka harus dijalankan secara hati-hati dan terbatas serta mengawasi kegiatan penangkapan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi stok sumberdaya ikan. Karena dengan adanya peningkatan upaya penangkapan maka jumlah hasil tangkapan akan mengalami peningkatan sampai pada kondisi optimal. Jika upaya penangkapan telah melebihi

kondisi optimal pemanfaatan, maka hasil tangkapan akan semakin menurun, karena semakin berkurangnya ketersediaan stok sumber daya ikan itu sendiri (Handoko dan Patriadi, 2005).

Pemanfaatan kondisi optimal penangkapan lestari terjadi apabila hasil tangkapan tidak melebihi *Maximum Sustainable Yield* (MSY), Zainuddin (2009) mengatakan bahwa nilai MSY untuk ikan pelagis besar mencapai 203 ton/tahun dan 734 ton/tahun untuk ikan pelagis kecil. Produksi penangkapan optimal merupakan hasil pemanfaatan tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya berdasarkan sejumlah *effort* yang digunakan (Hulaiifi, 2011).

Sari *et al.* (2012) mengatakan bahwa inti pemberian subsidi perikanan berhubungan dengan distribusi pendapatan dan keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan, sehingga diharapkan subsidi perikanan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor perikanan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Handoko dan Patriadi (2005) menambahkan efek positif subsidi kebijakan pemberian subsidi dikaitkan pada barang dan jasa yang memiliki dampak positif dengan tujuan menambah output dan lebih banyak sumberdaya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut. Efek negatif subsidi terdiri dari: a) subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien, konsumen membayar barang dan jasa lebih rendah daripada harga pasar sehingga kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi.

Dengan kata lain akibat harga yang disubsidi lebih rendah daripada biaya kesempatan (*opportunity cost*) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumberdaya untuk memproduksi barang yang disubsidi, b) subsidi menyebabkan distorsi harga seperti: subsidi besar yang digunakan untuk program populis

cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian, subsidi menciptakan suatu inefisiensi dan subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.

Secara umum saat ini alokasi anggaran di Kabupaten Pidie Jaya belum mengarah pada *green investment*, namun dinilai sudah positif menuju pembangunan perikanan berkelanjutan dengan adanya dialokasikan anggaran untuk kegiatan konservasi walaupun masih sedikit. Dengan demikian diharapkan program pengembangan konservasi dapat ditingkatkan, didukung dan dilanjutkan karena subsidi di bidang ini dapat memberikan dampak yang baik dan positif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Secara umum anggaran subsidi untuk bidang perikanan budidaya dinilai belum konsisten karena besaran anggaran belum menunjukkan tren yang jelas, namun demikian puncak subsidi tertinggi pada tahun 2009 mencapai 82,42% dari total belanja langsung, namun tahun 2010 menurun menjadi 69,49% dan tahun 2011 menurun lagi hingga tinggal 45,94% (Tabel 24), anggaran tersebut digunakan pada kegiatan budidaya air tawar dan payau.

Tabel 24. Jumlah Anggaran Bidang Perikanan Budidaya Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
2009	4.052.545.807	82,42
2010	4.101.383.256	69,50
2011	1.928.613.727	45,94
2012	2.397.339.692	46,36
2013	3.146.839.165	48,41

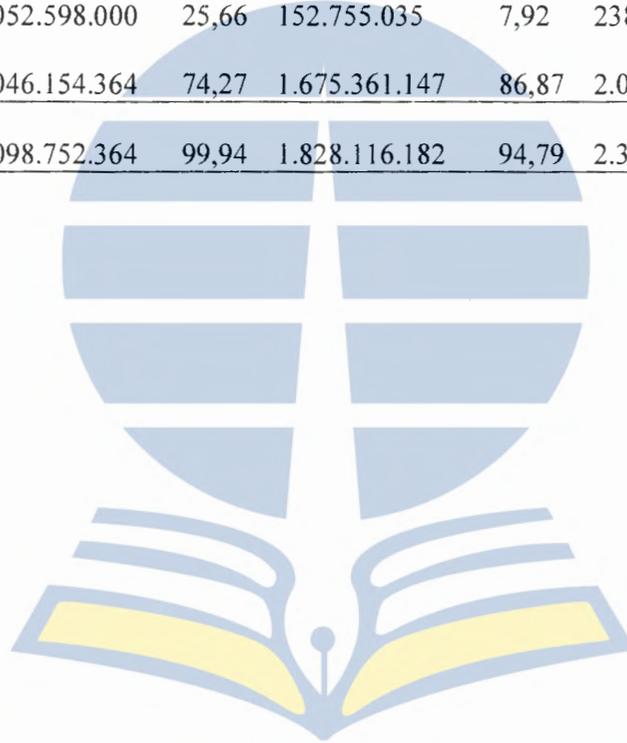
Alokasi subsidi anggaran untuk budidaya air payau di Kabupaten Pidie Jaya lebih besar dibandingkan dengan air tawar, alokasi budidaya air payau setiap tahun mengalami peningkatan mencapai 86,87% Tahun 2011. Namun sebaliknya

alokasi subsidi budidaya air tawar cenderung menurun hingga 7,92% pada tahun yang sama karena alokasi anggaran pada tahun tersebut lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur Balai Benih Multy Species Fish (BBMSF) Trienggadeng (Tabel 25).



Tabel 25. Perbandingan Proporsi Anggaran Menurut Jenis Budidaya Tahun Anggaran 2009 – 2013

Jenis Budidaya	Tahun Anggaran									
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah Anggaran (Rp)	(%)								
Budidaya air tawar	1.506.928.864	37,18	1.052.598.000	25,66	152.755.035	7,92	238.548.692	9,95	503.448.692	16,00
Budidaya air payau	1.902.024.800	46,93	3.046.154.364	74,27	1.675.361.147	86,87	2.070.591.000	86,37	2.467.540.473	78,41
Jumlah	3.408.953.664	84,12	4.098.752.364	99,94	1.828.116.182	94,79	2.309.139.692	96,32	2.970.989.165	94,41



Tabel 26. Alokasi Anggaran Bidang Budidaya Perikanan Sesuai Jenis Bantuan Tahun 2009 – 2013

Jenis Bantuan	Tahun Anggaran (Rp)									
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Bantuan agroinput	40.000.000	1,17	68.918.000	1,68	169.023.727	9,25	572.101.692	24,78	1.171.300.000	39,42
Bahan obat-obatan perikanan	3.200.000	0,09	3.000.000	0,07	4.000.000	0,22	10.000.000	0,43	69.200.000	2,33
Belanja bahan kimia	7.000.000	0,21	30.000.000	0,73	20.000.000	1,09	53.000.000	2,30	132.838.431	4,47
Alat kerja perikanan/mesin	-	-	500.000	0,01	119.500.000	6,54	-	0,00	749.810.000	25,24
Rehab / bangun/program pengembangan	382.500.000	11,22	1.224.314.000	29,87	1.361.017.000	74,45	1.510.979.000	65,43	66.051.279	2,22
Pengembangan insfrastuktur	2.539.308.664	74,49	2.045.682.364	49,91	50.000.000	2,74	9.300.000	0,40	662.588.000	22,30
Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	-	-	100.000.000	2,44	-	-	-	-	-	-
Fasilitas Pendukung	286.730.000	8,41	459.000.000	11,20	24.575.455	1,34	30.000.000	1,30	38.900.000	1,31
Perencanaan dan konsultasi pengawasan	150.215.000	4,41	167.338.000	4,08	80.000.000	4,38	123.759.000	5,36	80.301.455	2,70
Jumlah	3.408.953.664	100	4.098.752.364	100	1.828.116.182	100	2.309.139.692	100	2.970.989.165	100

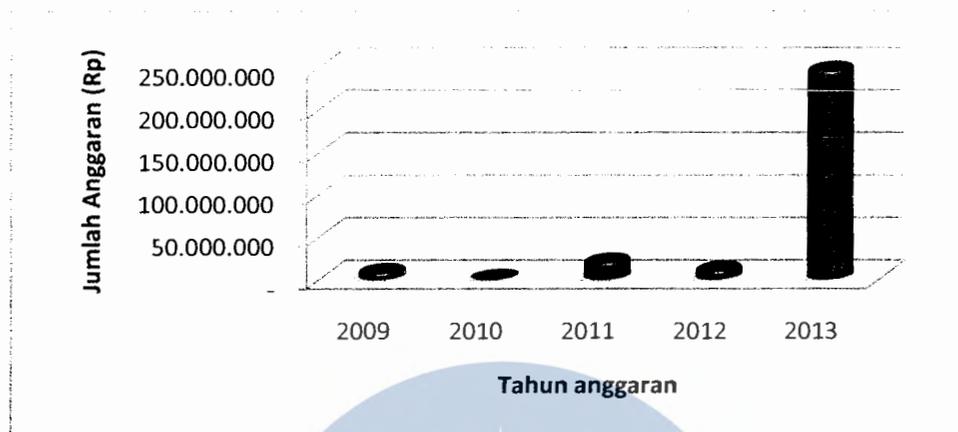
Berdasarkan Tabel 26 diketahui bahwa alokasi anggaran bidang perikanan budidaya lebih banyak diarahkan untuk pengembangan infrastruktur, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI) Cubo dan Balai Benih *Multy Species Fish* (BBMSF) Trienggadeng. Jenis kegiatan kedua terbesar adalah kegiatan rehabilitasi/pembangunan/pengembangan perbaikan saluran, jembatan dan jalan produksi perikanan. Bantuan terbesar ketiga adalah pemberian agroinput baik budidaya air payau maupun air tawar yang puncaknya terjadi Tahun 2013 (39,42%).

Pengalokasian anggaran yang cukup besar pada bidang perikanan budidaya merupakan suatu indikasi yang baik dalam mengembangkan kegiatan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya, dengan cara menerapkan sistem budidaya yang ramah lingkungan dan menggunakan teknologi terapan terkini. Minggawati dan Saptono (2012) mengatakan bahwa sektor perikanan budidaya merupakan salah satu usaha mendayagunakan sumberdaya akuatik secara optimal dan terus menerus, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani ikan itu sendiri maupun masyarakat secara luas. Budidaya perikanan merupakan salah satu upaya meningkatkan hasil produksi perikanan (Purnamawati, 2002).

4. Bidang Pengawasan, pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran bidang pengawasan sangat fluktuatif, tahun 2009 hanya 0,20%, alokasi anggaran tahun 2010 tidak dianggarkan dan tahun 2011 kembali dialokasikan 0,43% dari total anggaran dan meningkat hingga 3,81% Tahun 2013 (Gambar 7). Secara umum kegiatan di bidang pengawasan diperuntukan untuk

biaya operasional patroli kapal untuk mengurangi tingkat pelanggaran hukum di bidang kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pidie Jaya.



Gambar 7. Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Tahun 2009 - 2013

Pengalokasian anggaran pada bidang pengawasan di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya lebih fokus pada kegiatan patroli pantai gabungan yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk meminimalkan kegiatan *illegal fishing*. Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk kegiatan patroli mencapai 62% dari jumlah anggaran bidang pengawasan, namun tahun 2010 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dikarenakan biaya yang dialokasikan lebih banyak diserap untuk bidang budidaya terutama pembangunan infrastruktur dan tahun 2011 – 2013 kembali dialokasikan anggaran masing-masing 55,45%, 68,13% dan 3,68% dari total anggaran untuk bidang pengawasan.

Sampai saat ini, Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki kapal patroli untuk mengawasi kegiatan penangkapan (personal komunikasi dengan Kepala Bidang Pengawasan). Selama ini kegiatan pengawasan dilakukan dengan menyewa kapal dari Airut Pidie, sehingga untuk melakukan kegiatan pengawasan agak terbatas. Selain itu salah satu cara meningkatkan pengawasan perairan adalah dengan menjalin kerjasama dengan TNI Polisi Air/Airut dan kelompok masyarakat

pengawas (Pokmaswas) untuk menjaga wilayah teritorial perairan dari kegiatan yang melanggar peraturan. Yuliana dan Winata (2012) mengatakan pengawasan masyarakat pesisir secara langsung terhadap sumber daya kelautan dan perikanan sangat diperlukan karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan laut dan kegiatan pengawasan berbasis masyarakat ini dinilai efektif mengurangi *illegal fishing*.

Kegiatan patroli dilakukan selama tiga kali dalam setahun, dengan tiga wilayah rute lokasi patroli yaitu: a). wilayah barat: Kecamatan Bandar Baru – Kecamatan Panteraja, b). wilayah tengah: Kecamatan Trienggadeng – Kecamatan Meureudu, dan c). wilayah timur: Kecamatan Jangka Buya – Kecamatan Ulim. Tugas utama patroli adalah penertiban surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan rekomendasi dari Dinas Kelautan Kabupaten Pidie Jaya, pengawasan penggunaan alat tangkap dan kondisi armada penangkapan.

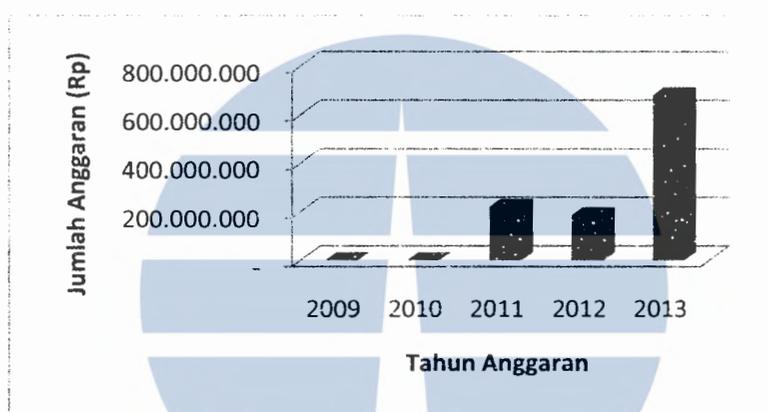
Kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau peraturan perundang-undangan, maka kapal patroli akan melakukan inspeksi laut (*sea inspection*) terhadap kapal perikanan tersebut untuk memperoleh barang bukti pelanggaran. Namun sampai saat ini kegiatan pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada himbauan kepada nelayan dan armada yang melanggar peraturan, sedangkan untuk menangkap pelanggar dilakukan oleh TNI atau Polisi Air. Aksi penegakan hukum (*law enforcement*) perlu dilakukan terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan (Sianipar, 2011).

Selain keterbatasan kapal patroli, di Kabupaten Pidie Jaya juga belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi bidang perikanan dan kelautan sebagai penerima pengaduan adanya tindak pelanggaran. Ketaren *et al.* (2013) mengatakan tugas dan wewenang PPNS adalah: melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing, mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Basri (2012) menambahkan tugas dan wewenang PPNS antara lain: pelaksana kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan, putusan acara cepat kepada terpidana dan menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan serta mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk.

Alokasi anggaran yang terbatas hanya dapat melakukan tiga kali kegiatan patroli pengawasan selama setahun, hal ini masih kurang efektif mengingat luas pengelolaan laut di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 210,84 km² sehingga perlu peningkatan pengawasan pengelolaan laut melalui peningkatan dan peran serta kelembagaan antara lembaga adat panglima laot, panglima lhok dan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas). Mengingat penertiban perijinan merupakan bagian pengelolaan yang berperan dalam pengendalian sehingga persyaratan perijinan harus mencakup komponen pengelolaan perikanan lainnya seperti pengawasan terhadap bahaya menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan yang menjadi tanggung jawab aparat di luar unit perijinan.

5. Bidang Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)

Alokasi anggaran untuk bidang pengolahan dimulai tahun 2011, pada tahun sebelumnya kegiatan bidang pengolahan digabungkan dalam alokasi anggaran bidang tangkap, pada tahun 2011 alokasi anggaran untuk bidang P2HP mencapai 220 juta, tahun 2011 menurun dan tahun 2013 meningkat hingga 300% (Gambar 8).



Gambar 8. Alokasi Anggaran Bidang Pengolahan Tahun 2009 – 2013

Alokasi anggaran untuk bidang pengolahan umumnya digunakan untuk penyediaan alat pengolahan (Tabel 28) dengan jenis komoditas hasil olahan terdiri dari pengolahan ikan teri asin/rebus dan pembuatan ikan asin. Kegiatan pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya masih dilakukan secara sederhana yang ditandai dengan kegiatan produksi pengolahan tergantung pada musim, yang berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku yang sangat terbatas tergantung pada hasil tangkapan nelayan sehingga menyebabkan produksi yang dihasilkan rendah.

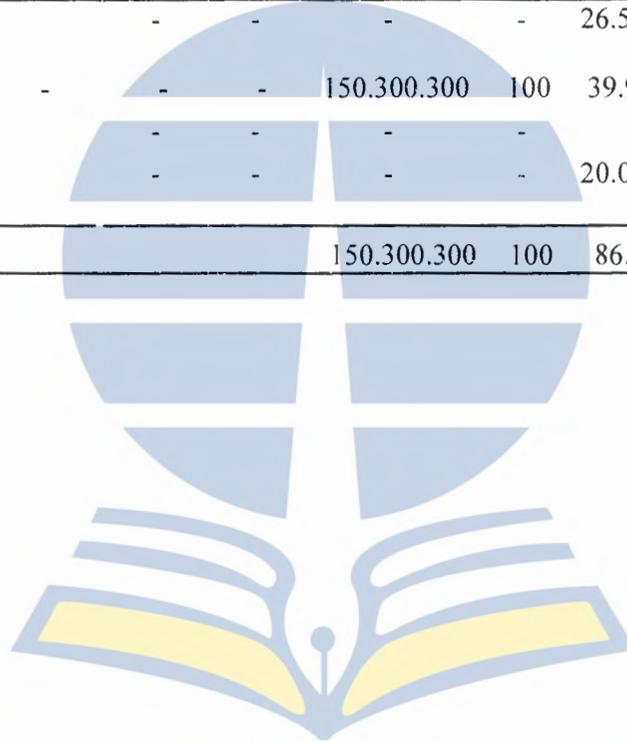
Pengolahan merupakan salah satu rantai penting dalam industri perikanan, dengan tujuan mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama mungkin dengan cara menghambat atau menghentikan kerusakan ikan yang

disebabkan oleh mikroorganisme agar ikan dapat sampai ke konsumen dalam keadaan baik (Afrianto dan Liviawaty, 1998). Salah satu ciri khas yang menonjol dari sistem pengolahan sederhana adalah jenis dan bahan baku serta bahan pembantu yang sangat bervariasi, kondisi lingkungan yang sulit dikontrol, dan bergantung pada faktor alam (Heruwati, 2002).



Tabel 27. Alokasi Anggaran Bidang Pengolahan Sesuai Jenis Bantuan Tahun 2009 – 2013

No	Jenis Kegiatan	Tahun Anggaran									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
1	Pengadaan para-para untuk jemuran ikan			-	-	-	-	26.595.650	30,73	99.840.000	25,6
2	Pengadaan <i>cool box</i>	-	-	-	-	150.300.300	100	39.955.000	46,16	131.200.000	33,63
3	Pengadaan <i>ice storage</i>			-	-	-	-	-	-	59.200.000	15,18
4	Pengadaan alat/bahan untuk pengolahan ikan			-	-	-	-	20.000.000	23,11	99.830.000	25,59
	Jumlah					150.300.300	100	86.550.650	100	390.070.000	100



Oktaviano (1998) menambahkan bahwa pengolahan tradisional memiliki empat karakteristik yaitu: a) umumnya bersifat usaha rumah tangga nelayan kecil atau bukan nelayan yang berada di sekitar perairan atau sepanjang pantai dan biasanya tergantung musim, b) skala usahanya sangat kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keahlian pengolah biasanya didapatkan secara turun temurun, c) teknik pengolahan sangat sederhana dan cenderung sulit berkembang menggunakan teknologi modern dan d) umumnya orientasi pasar lokal, produknya spesifik, volume produksi kecil, tidak mampu menghadapi persaingan sehat, kualitas produk rendah serta lemah dalam keterampilan manajemen dan motivasi kewirausahaan.

Pengembangan usaha pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, kebijakan, dan tenaga kerja. Adanya sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kualitas produksi olahan, demikian juga kebijakan dan tenaga kerja, ketika kebijakan memihak terhadap keberlangsungan industri rumah tangga maka minat tenaga kerja akan semakin meningkat dan tenaga kerja akan semakin menekuni usaha tersebut. Kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk pengembangan pengolahan ikan, baru terealisasi pada tahun 2013 dengan membangun sentral pengolahan ikan teri di Kecamatan Jangka Buya,

Kendala utama pengolahan industri rumah tangga di Pidie Jaya kurang berkembang antara lain: 1) kelemahan sumberdaya manusia ditandai dari rendahnya tingkat pendidikan pengolah yang rata-rata SMA, 2) peralatan yang digunakan sangat sederhana dan terbatas sehingga untuk kesulitan melakukan produksi dalam jumlah banyak, 3) kekurangan modal untuk mendapatkan bahan

baku yang lebih banyak terutama jika tidak musim ikan, dan 4) metode pemasaran terbatas lokal saja dan sebahagian dikirim ke Kabupaten terdekat seperti Kabupaten Bireuen, Pidie dan Banda Aceh. Untuk mengatasi kendala dalam bidang pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya perlu diberikan pendidikan dan pelatihan dalam mengolah ikan, penerapan teknologi pengolahan modern serta melakukan studi banding ke daerah lain yang lebih baik sistem pengolahannya.

6. Status dan Arah Kebijakan Pengelolaan Subsidi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

Dalam pemberian subsidi perikanan kualitas pengelolaan perikanan kondisi stok ikan terdiri dari tiga kategori yaitu *under exploited*, *full exploited* dan *over exploited*. Kondisi stok ikan *under exploited* terdiri dari tiga kualitas manajemen yaitu: kualitas manajemen baik, buruk dan sedang. Kualitas pengelolaan perikanan kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target pembangunan perikanan merupakan salah satu faktor penentu dari kebijakan subsidi perikanan, semakin baik kualitas pengelolaan perikananannya, maka akan semakin rasional pemberian subsidi perikanan. Sebaliknya semakin buruk kualitas pengelolaan perikananannya, maka akan semakin hati-hati penerapan program subsidi bagi kawasan atau jenis perikanan yang menjadi target penerapan subsidi perikanan.

Berdasarkan hasil analisis subsidi perikanan dengan menggunakan pembobotan (*scoring*) penilaian pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya masuk dalam katcgori sedang (1.100 point). Hal ini berarti bahwa kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya sudah cukup baik dengan kualitas manajemen pengelolaan perikanan sedang yakni kondisi stok ikan *under exploited* seperti terlihat (Tabel 28) dan status pengelolaan terlihat pada

Tabel 29. Namun dalam melaksanakan program pengelolaan perikanan harus disertai kehati-hatian dengan pengendalian ketat agar penangkapan ikan tidak berkembang melebihi daya dukung sumberdaya ikan. Salah satunya dengan meningkatkan kesepakatan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat nelayan dalam menentukan rencana strategis mendatang berupa usulan program terutama penguatan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan menuju perikanan hijau di Kabupaten Pidie Jaya.

Mengacu pada WWF Indonesia (2013) tentang pedoman identifikasi pembiayaan subsidi perikanan (Tabel 29), alokasi anggaran subsidi perikanan tangkap pada tahun 2009 mencapai 75% alokasi perikanan hijau, tahun 2010 meningkat hingga 80%, tahun 2011 menurun kembali menjadi 75%, sedangkan tahun 2012 dan 2013 kembali menurun masing-masing hingga 50%.

Peningkatan dan penurunan alokasi perikanan hijau dari tahun 2009 – 2013 ditentukan berdasarkan trend pembiayaan perikanan tangkap yang mengarah pada kegiatan eksploitasi berlebih, seperti pengadaan alat tangkap, pembelian armada tangkap dan pengadaan mesin perikanan. Sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada keberadaan stok sumberdaya ikan di perairan.

Tabel 28 Hasil Matriks Kriteria dan Skor Komponen Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

Deskripsi	Rangking	Bobot	Skor	nilai	Skor Kualitas Komponen		
					1	2	3
tujuan kebijakan dan pengelolaan perikanan	4	10	2	80	tujuan perikanan tersedia tetapi tidak menganut prinsip-prinsip keberlanjutan perikanan	statement tujuan perikanan hanya mengandung sebagian dari prinsip-prinsip keberlanjutan prikanan	statement tujuan perikanan mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan prikanan
mekanisme, jenis dan kualitas pengumpulan data	7	10	2	140	tidak ada data	<i>the best data available</i>	jenis dan kualitas data reliable atau menggunakan <i>optimal the best scientific evidence/ data available</i>
kualitas analisis yang berbasis ilmiah terkait dengan keberlanjutan perikanan	5	10	2	100	tidak ada analisis	ada analisis tetapi menggunakan metode yang tidak sesuai dengan keberlanjutan perikanan	analisi tersedia menggunakan metode yang sesuai dengan kaidah yang terbaik dan memperhitungkan prinsip kehati-hatian dalam mencapai keberlanjutan perikanan
ketersediaan rencana pengelolaan perikanan (RPP)	8	10	1	80	tidak ada RPP yang berbasisi spesies atau ada RPP tapi belum memiliki kelengkapan sistem pengelolaan perikanan	RPP tersedia dan sudah memiliki kelengkapan dari sistem pengelolaan perikanan tetapi belum didukung oleh peraturan hukum	RPP tersedia sesuai dengan kelengkapan sistem pengelolaan perikanan dan didukung oleh peraturan hukum
dukungan multi pihak dilibatkan dalam keberlanjutan perikanan	6	10	2	120	tidak ada aktivitas konsultasi dalam perencanaan dan evaluasi perikanan	ada aktivitas konsultasi tetapi hanya terbatas di kalangan pemerintah	ada aktivitas konsultasi yang melibatkan pemerintah, <i>civil society</i> dan pengguna sumberdaya

Lanjutan Tabel 28.

implementasi kebijakan perikanan efektif dan sesuai dengan perencanaan	2	10	1	20	tidak ada implementasi dari RPP	RPP hanya diimplementasikan pada beberapa parameter yang mutlak harus ada berupa <i>fisheries measure, acces, allocation</i> .	RRP diimplementasikan dengan efektif
alokasi penangkapan adil, tidak melebihi kapasitas, <i>first come first served</i>	3	10	2	60	melebihi JTB	tidak melebihi JTB (MEY<JTB<MSY)	tidak melebihi JTB (MEY<JTB<MSY), adil, first come first served basis
legal adoption terkait dengan keberlanjutan perikanan	10	10	2	200	tidak ada payung hukum formal maupun informal	parsial: tidak semua kebutuhan kebijakan pengelolaan terpenuhi	semua kebutuhan legal formal terpenuhi
efektifitas dari keputusan tersebut	9	10	3	270	tidak ada kegiatan penegakan hukum	<i>at least</i> sudah ada regulasi, belum ada implementasi yang optimal, pelaksanaan pengawasan sampai tahap penyidikan	pengawasan hingga litigasi dengan pemberian sanksi yang setimpal, penegakan hukum yang efektif untuk mencegah <i>overfishing</i>
efisiensi dan keberadaan piranti struktural pendukung	1	10	3	30	instructive governance approach	consultative governance approach	collaborative governance approach melalui pembentukan lembaga pengelolaan yang formal
Jumlah				1100			

Tabel 29. Pedoman Pemberian Subsidi Perikanan Sesuai dengan Kualitas Pengelolaan Kawasan atau Jenis Perikanan yang Menjadi Target Subsidi Perikanan di Kabupaten Kabupaten Pidie Jaya (WWF-Indonesia, 2013)

No	Tipe Subsidi	Kondisi Stok Ikan				
		Full Exploited	Over Exploited	Under Exploited		
				Status Kualitas Manajemen Buruk	Status Kualitas Manajemen Sedang	Status Kualitas Manajemen Baik
1	Pengelolaan perikanan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan
2	MPA, rehabilitasi habitat dan/atau pemulihan stok ikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan
3	Penelitian dan pengembangan perikanan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan
4	BBM	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan
5	Pengurangan pajak perikanan (termasuk pungutan perikanan)	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan
6	Program pemasaran penyempitan dan pemeliharaan serta dukungan harga dan pemasaran	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian
7	Program pengembangan usaha perikanan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan
8	Pembelian sarana produksi (peralatan)	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	Tidak boleh diberikan	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian

Lanjutan Tabel 29.

	Program pembelian ikan- perikanan dan modal usaha kapal perikanan pada perikanan yang telah mempunyai dan mempunyai teknologi baru.	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan
	Program pembelian teknologi perikanan	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan			
11	Program bantuan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan			
12	Program pengembangan masyarakat nelayan	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan			
13	<i>Buyback program</i>	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	Tidak ada opsi program subsidi perikanan		
14	Program peningkatan kapasitas nelayan terkait mutu hasil tangkapan (keterampilan dan pengetahuan)	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian				
15	<i>Swap program</i> terkait kapasitas perikanan (kapal kecil ditukar dengan kapal besar)	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian				
16	Program penggantian alat tangkap	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan			
17	Support terhadap peningkatan kualitas produk	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian	boleh diberikan	boleh diberikan

Sampai saat ini pengkajian stok sumberdaya ikan di perairan Kabupaten Pidie Jaya belum pernah dilaksanakan, sehingga tidak diketahui berapa jumlah hasil tangkapan maksimal dan optimal serta apakah sudah *overfishing* atau belum pada perairan. Kendala utama dalam menentukan pendugaan stok ikan di Kabupaten Pidie Jaya adalah keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia (personal wawancara dengan Kepala Bidang perikanan tangkap).

Syahailatua (1993) mengatakan bahwa pengetahuan mengenai stok ikan sangat diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya ikan, terutama untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Tujuan penentuan jumlah stok ikan adalah untuk memberikan gambaran suatu nilai dugaan besarnya biomas ikan berdasarkan kelompok jenis ikan dalam kurun waktu tertentu, sehingga pengelolaan perikanan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan (Melmambessy, 2010). Sulistiyo (2012) menambahkan pengkajian stok perikanan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor pertumbuhan ikan (*growth*), kematian ikan (*mortality*) yang terdiri atas kematian alami dan akibat penangkapan serta migrasi ikan ke daerah lain. Namun sayangnya kajian stok ikan perairan Pidie Jaya belum pernah dilakukan, oleh karena itu dinilai penting untuk segera dilakukan sebagai acuan pengelolaan perikanan di masa mendatang.

Ihssen *et al.* (1981) mengatakan ada tujuh metode dalam pengkajian stok ikan antara lain: a) parameter populasi yaitu menggambarkan karakter-karakter yang terjadi karena adanya beberapa subdivisi di dalam jenis ikan meliputi kelimpahan, *yield*, komposisi umur, pertumbuhan, rekrutmen dan mortalitas yang dilakukan secara teratur, b) penandaan dengan menggunakan tagging, tato dan pewarnaan, c) fisiologi dan tingkah laku dipergunakan terutama untuk menentukan

kemampuan adaptasi stok terhadap lingkungannya, d) morphometrik dan meristik, karakter morfometrik diukur dari bagian struktur luar tubuh ikan yaitu panjang total, panjang kepala, panjang pangkal sirip, diameter mata, tinggi badan dan lebar kepala. Sedangkan karakter meristik dihitung berdasarkan jumlah jari-jari sirip, jumlah tapis insang dan jumlah ruas tulang belakang, e) struktur keras atau berkapur dengan menggunakan tulang, otolit dan sisik ikan, f) cytogenetic yaitu pengukuran morfologi dan tingkah laku kromosom selama proses meosis dan mitosis dan g) karakter elektroforesis yaitu prosedur pemisahan protein atas dasar muatan listriknya.

Badrudin *et al.* (2013) menambahkan metode pengkajian stok ikan dapat dikelompokkan atas tiga kategori yaitu: 1) metode holistik: model yang dirancang berdasarkan konsep bahwa populasi/stok ikan merupakan suatu kesatuan utuh tanpa mengikutsertakan aspek-aspek lain yang menunjang dinamika populasinya, 2) metode dinamik atau model analitik dilakukan dengan mengikutsertakan aspek-aspek dinamika populasi yang mendukung perkembangan populasi tersebut, seperti laju pertumbuhan, laju kematian, panjang maksimum, parameter hubungan panjang-berat (isometrik atau allometrik) dan laju penangkapan serta 3) metode ekosistem.

Kajian tentang *overfishing* di Kabupaten Pidie Jaya belum pernah dilakukan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan responden nelayan diketahui bahwa area penangkapan dilakukan berpindah-pindah bahkan lebih jauh dari daerah penangkapan awal karena hasil tangkapan yang semakin menurun. Hal ini sudah terjadi pada lima tahun terakhir, karena hasil tangkapan pada lokasi awal sudah menurun yang ditandai dari ukuran ikan yang diperoleh juga semakin kecil. Hal ini

sesuai pernyataan Wiyono (2006) ciri-ciri kondisi *overfishing* antara lain: waktu melaut menjadi lebih panjang dari biasanya, lokasi penangkapan menjadi lebih jauh dari biasanya, ukuran mata jaring menjadi lebih kecil dari biasanya, yang kemudian diikuti produktivitas (hasil tangkapan per satuan upaya/trip atau CPUE) yang menurun, ukuran ikan sasaran yang semakin kecil, dan biaya penangkapan (operasional) yang semakin meningkat.

Jenis-jenis *overfishing* terdiri dari 1) *overfishing* pertumbuhan (*growth overfishing*) terjadi apabila sumberdaya ikan ditangkap sebelum tumbuh mencapai ukuran tertentu misalnya pemangsaan, 2) *overfishing* rekrutmen (*recruitment overfishing*) terjadi ketika kegiatan penangkapan telah menyebabkan stok sumberdaya kekurangan induk, 3) *overfishing* biologi (*biological overfishing*) merupakan kombinasi antara *growth overfishing* dan *recruitment overfishing* yang terjadi ketika tingkat upaya penangkapan dalam suatu perikanan telah melampaui tingkat yang diperlukan untuk menghasilkan MSY, 4) *overfishing* ekonomi (*economic overfishing*) terjadi jika tingkat upaya penangkapan telah melampaui tingkat yang diperlukan untuk menghasilkan MEY, 5) *overfishing* ekosistem (*ecosystem overfishing*) terjadi ketika kegiatan penangkapan telah menyebabkan perubahan komposisi ekosistem, terdapat jenis stok sumberdaya ikan tertentu menghilang atau menjadi langka dan 6) *overfishing* malthusian (*malthusian overfishing*) merupakan *overfishing* yang terkait dengan masalah pertumbuhan penduduk (Wiyono, 2006).

Dengan demikian dalam pemberian subsidi perikanan harus mempertimbangan kondisi sumberdaya ikan pada suatu wilayah, sumberdaya ikan dapat lestari bila jumlah pada tingkat *maximum sustainable yield* (MSY) setara

dengan kemampuan pulihnya. Apabila pemanfaatan sumberdaya ikan melebihi kemampuan daya dukungnya menyebabkan menurunnya produktivitas usaha dan produksi ikan (Schorr dan Caddy, 2007). Namun produktivitas usaha sumberdaya ikan bukan milik siapapun, sehingga tidak seorangpun memiliki hak khusus atau melarang orang lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah untuk mengendalikan kegiatan penangkapan ikan dalam mengelola sumberdaya perikanan (Laka, 2003).

Selain itu sejauh ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum pernah membuat Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), sehingga tidak diketahui kondisi berapa jumlah tangkapan maksimal dan optimum pada setiap penangkapan. Sehingga kondisi sumberdaya ikan di Kabupaten Pidie Jaya belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap diprediksi alokasi tangkapan tidak melebihi jumlah tangkap diperbolehkan (JTB). Hal ini tentu bertolak belakang dengan hasil wawancara dengan nelayan di lapangan. Oleh karena perlu dilakukan pembuatan rencana pengelolaan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya.

Pembuatan rencana pengelolaan perikanan (RPP) tangkap dan budidaya perlu dilaksanakan secepat mungkin. RPP perikanan tangkap ditentukan dengan penetapan potensi dan alokasi sumberdaya ikan, pengaturan jumlah tangkapan yang disarankan, penetapan persyaratan/standar prosedur operasional penangkapan ikan dan penetapan sistem pemantauan kapal ikan. RPP perikanan budidaya dilakukan dengan pembuatan tata ruang wilayah, rencana pengembangan sistem pembudidayaan (pengembangan sistem kawasan, berkelompok, teknologi anjuran, penentuan metoda budidaya yang direkomendasikan, penerapan *biosecurity* yang

konsisten, sarana produksi yang standar dan ramah lingkungan serta manajemen operasional yang cermat dan tertib), rencana sistem pembenihan (pengembangan *broodstok center*, UPR dan sertifikasi induk/benih), rencana pengembangan sarana/prasarana budidaya, serta tersedianya tata niaga dan pemasaran hasil budidaya.

Pemberian alat tangkap bagi nelayan sudah termasuk jenis alat tangkap ramah lingkungan, namun dalam pengelolaan sumberdaya ikan ditinjau dari teknologi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Pidie Jaya harus sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh instansi terkait yaitu tidak melebihi daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan kemampuan memulihkan sumberdaya ikan, sehingga sumberdaya ikan tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Subsidi teknologi yang diberikan selama ini kepada nelayan terutama armada penangkapan lebih banyak berukuran kapal <5 GT, demikian juga penerapan teknologi di bidang budidaya dan pengolahan belum semua memakai teknologi terapan yang modern, masih menggunakan teknologi sederhana. Program pembangunan, penggantian dan modernisasi kapal, perbaikan teknologi penangkapan dan adopsi teknologi yang baru akan menjadi subsidi yang bermanfaat jika sumberdaya ikannya belum dimanfaatkan penuh (Schorr dan Caddy, 2007).

Pemberian subsidi dalam bentuk sarana dan prasarana penyimpanan dan pengolahan, dukungan harga, pemasaran dan pengembangan usaha perikanan dikategorikan subsidi tidak bermanfaat apabila sumberdaya ikannya sudah

dimanfaatkan berlebih maupun bila belum dimanfaatkan penuh namun pengelolaan perikanannya buruk (Sumaila, 2002).

Program pembangunan pelabuhan diarahkan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi pelaku usaha perikanan, subsidi akan bermanfaat jika bila dilaksanakan pada daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan pemanfaatan sumberdaya ikan dikatakan tidak bermanfaat (buruk) jika pemanfaatan sumberdaya sudah penuh ataupun pemanfaatan belum penuh namun pengelolaannya buruk.

Subsidi pengembangan masyarakat perikanan akan bermanfaat jika dilaksanakan pada daerah penangkapan yang sumberdaya ikannya belum dimanfaatkan penuh dan peran pemerintah menerapkan pengelolaan ikan yang baik. Sumaila (2010) mengatakan bahwa program bantuan dan pengembangan masyarakat perikanan merupakan subsidi yang tidak selalu jelas dampaknya (*ambiguous subsidies*).

Berdasarkan aspek sosial kebijakan perikanan di Kabupaten Pidie Jaya harus menciptakan pemerataan hasil, mobilitas sosial, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat baik nelayan, pengolah maupun pembudidaya ikan serta pengembangan kelembagaan. Terutama pada bantuan aspirasi harus melalui penapisan sehingga tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kebijakan pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Pidie Jaya sudah mengarah kepada sektor perikanan budidaya, sehingga diharapkan sektor ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi andalan yang diwujudkan melalui sistem usaha budidaya perikanan yang berdaya saing secara teknologi, berkelanjutan, dan berkeadilan. Namun belum sepenuhnya tercapai, oleh karena itu

perlu dilakukan peningkatkan mutu produksi, meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya.

Sarana dan prasarana perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya sudah cukup tersedia. Pabrik es, *chilli room*, unit pembenihan ikan, sentral pengolahan dan laboratorium telah tersedia, namun dalam pengelolaannya belum maksimal dimanfaatkan karena terbatasnya biaya operasional. Untuk itu diperlukan pengalokasian sejumlah anggaran untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Peningkatan hasil produksi dilakukan melalui usaha penangkapan dan budidaya dengan memanfaatkan sumberdaya perlu diikuti dengan usaha pengolahan baik skala rumah tangga maupun industri besar. Eksploitasi penangkapan bila dilaksanakan tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya dapat menyebabkan *over fishing*, sehingga *fishing ground* semakin jauh menyebabkan biaya operasional penangkapan semakin besar. Oleh karena itu perlu dikembangkan usaha perikanan tangkap yang efisien dan lestari dengan dukungan teknologi yang memadai.

Kelembagaan masyarakat perikanan di Kabupaten Pidie Jaya sudah berkembang, namun perlu ditingkatkan dan dibina lagi. Terutama dalam pembentukan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) pada bidang perikanan budidaya, Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk bidang tangkap dan kelompok pengolah ikan (UPI) untuk bidang pengolahan yang tersebar di seluruh kecamatan. Di Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing bidang memiliki lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda antara lain: a) bidang tangkap: Lembaga Adat Panglima Laot yang terdiri dari satu panglima laot kabupaten dan delapan

panglima lhok, b) bidang perikanan budidaya: Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) yang tersebar dalam delapan kecamatan, c) bidang pengawasan: Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas) yang berada di Kecamatan Trienggadeng, Meureudu, Panteraja dan Jangka Buya dan d) bidang pengolahan: Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sedangkan kebijakan penguatan kelembagaan bidang keuangan dapat dilakukan dengan penguatan modal kelompok, inovasi teknologi dan dukungan pemasaran, pembinaan kemitraan usaha, pemberian akses kepada lembaga keuangan serta pengembangan antar kelompok.

7. Efektifitas Pemanfaatan Subsidi Perikanan

a. Nelayan tangkap

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden nelayan yang berjumlah 46 orang lebih kurang 71,8% responden menyatakan pernah menerima bantuan dalam bentuk barang dan sisanya 28,2% dalam bentuk uang tunai. Jenis subsidi yang diterima nelayan di Kabupaten Pidie Jaya berupa alat tangkap, armada penangkapan, pengadaan alat pendingin ikan dan pengadaan mesin perikanan dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Lebih kurang 10,87% responden penerima subsidi merupakan perorangan, sedangkan 89,13% tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUB), rata-rata responden mengungkapkan subsidi yang diterima bermanfaat dan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan. Luhur dan Sari (2012) mengatakan bahwa subsidi perikanan diperlukan nelayan untuk dapat dimanfaatkan dan menjamin keberlanjutan usaha.

Berdasarkan mata pencaharian penerima subsidi 15,22% berprofesi sebagai petani, wiraswasta 21,74% dan nelayan 63,04%. Dengan demikian lebih kurang 36,96% pemberian subsidi perikanan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya tidak tepat sasaran terutama penerima bantuan yang bersumber dari dana aspirasi. Handoko dan Patriadi (2005) mengatakan bahwa perlu pengalihan subsidi yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok bagi nelayan kurang mampu (*targeted subsidy*) lainnya.

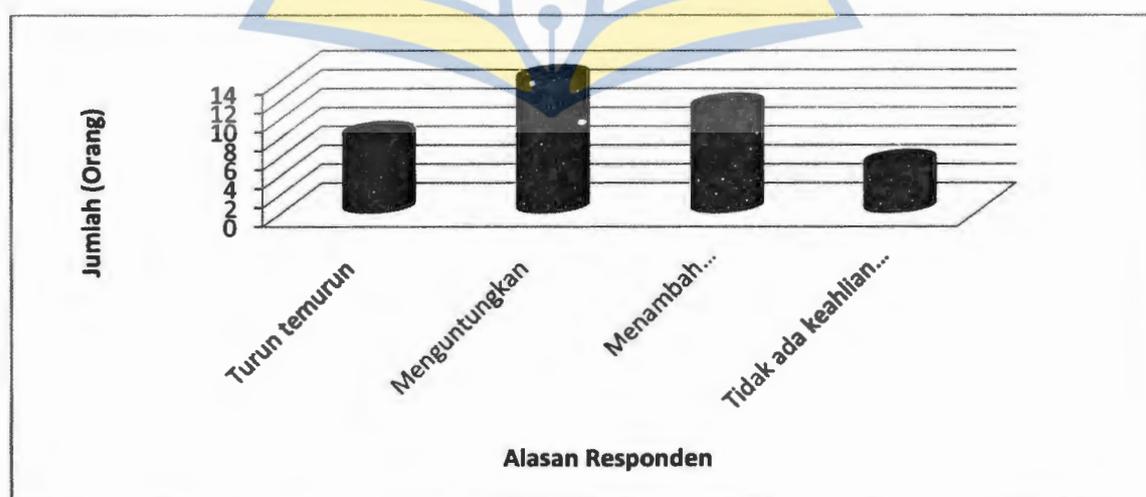
Peningkatan pendapatan nelayan penerima subsidi di Kabupaten Pidie Jaya sudah baik, 78,26% nelayan penerima subsidi mengatakan hasil pendapatannya meningkat, sedangkan 21,24% mengatakan menurun atau tidak berubah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi perikanan kepada nelayan tangkap di Kabupaten Pidie Jaya sudah cukup efektif.

Menurut responden penurunan hasil pendapatan dipengaruhi oleh jenis bantuan yang kurang berkualitas terutama pada jenis alat tangkap rawai sehingga cepat rusak dan kondisi alam yang menyebabkan alat tangkap hilang ketika ditancapkan, selain itu tergantung pada jenis dan jumlah bantuan yang diterima. Sebahagian responden menerima bantuan lengkap seperti alat tangkap dan armada penangkapan, namun disisi lain responden hanya menerima alat tangkap saja. Sari *et al.* (2012) mengatakan subsidi merupakan salah satu cara yang tepat untuk membantu nelayan dalam mengembangkan dan meningkatkan produktivitas. Subsidi menambah output dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan (Handoko dan Patriadi, 2012).

b. Pembudidaya dan Pengolah Ikan

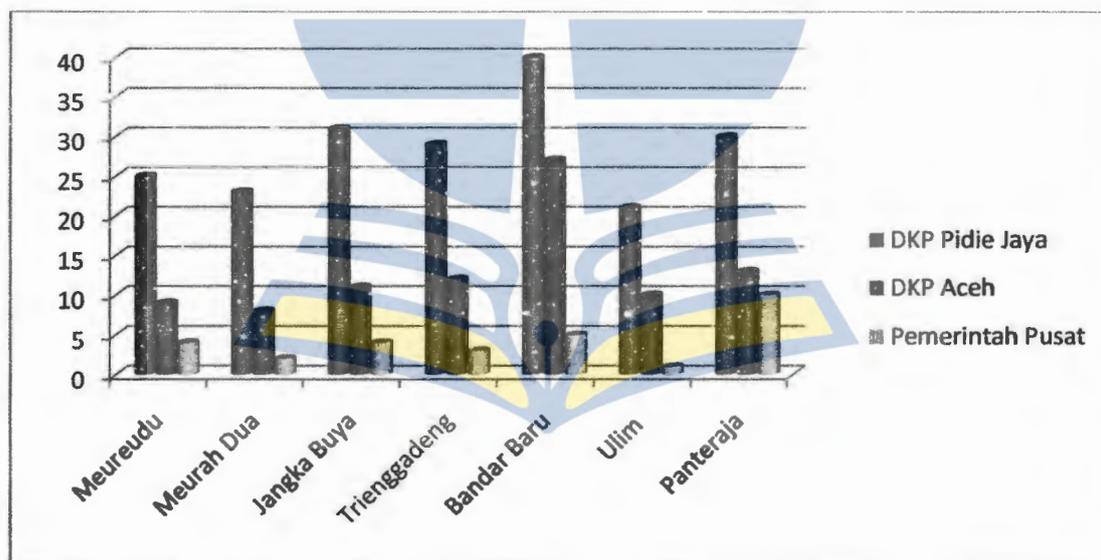
Jumlah responden pembudidaya dan pengolah 38 orang yang terdiri dari 29 orang pembudidaya ikan dan 9 orang pengolah, sekitar 76,29% responden telah berkeluarga dan 23,08% belum menikah. Dilihat dari umur responden sekitar 47,37% merupakan responden yang berumur antara 31 - 40 tahun dan terendah umur 20 – 30 tahun (2,63%). Sedangkan ditinjau dari pendidikan, tingkat SMA mencapai 46,83% dan terendah tingkat sarjana (2,63%).

Umumnya alasan responden melakukan budidaya kegiatan yang menguntungkan, berbeda dengan pengolah kegiatan tersebut lebih pada usaha sampingan saja untuk menambah penghasilan rumah tangganya (Gambar 10). Berdasarkan hasil wawancara 71,05% menerima bantuan dalam bentuk barang, sedangkan uang tunai 28,95% dengan jumlah paling banyak di Kecamatan Panteraja. Rata-rata responden mengatakan pemberian subsidi dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 9. Alasan Responden Melakukan Usaha Budidaya dan Pengolahan di Kabupaten Pidie Jaya

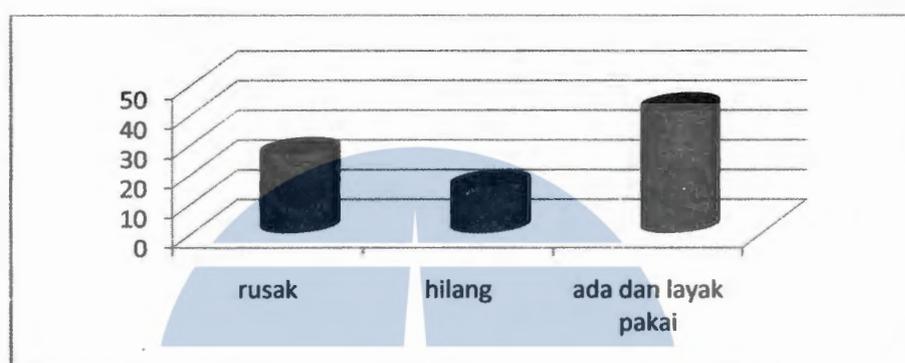
Responden mengatakan lebih sering menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya (70,63%), alokasi subsidi perikanan dari DKP Kabupaten Pidie Jaya diberikan berdasarkan alokasi anggaran (DPA) setiap tahunnya yang didalamnya terdapat sebagian alokasi anggaran dari aspirasi DPRK, alokasi subsidi dari DKP Aceh diberikan dalam bentuk dana hibah dan sosial (9,52%), sedangkan dari pemerintah pusat diberikan dalam bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan budidaya dan P2HP yang didalamnya sebahagian terdapat dana aspirasi/DPR (19,84%). Alokasi subsidi DKP Kabupaten Pidie Jaya lebih banyak di Kecamatan Bandar Baru (20,10%), sedangkan subsidi pemerintah pusat lebih banyak di Kecamatan Panteraja sebesar 34,48% (Gambar 10).



Gambar 10. Proporsi Intensitas Lembaga Pemberi Subsidi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

Secara umum rata-rata responden mengatakan pemberian subsidi sudah dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhannya, namun demikian sebahagian responden mengaku jenis bantuan berkualitas rendah seperti ukuran benih yang

tidak sesuai spesifikasi dan jika dalam bentuk uang tunai jumlahnya tidak mencukupi sebagai modal kerja. Bantuan yang diterima responden $\pm 50\%$ nya masih ada dan layak pakai dan 18,29% sudah rusak dan hilang (Gambar 12). Khusus bantuan agro input merupakan barang habis pakai seperti pakan, pupuk dan saponin.



Gambar 11. Kondisi Barang Bantuan yang Sudah Diterima

Berdasarkan hasil produksi sebanyak 79,76% responden penerima subsidi perikanan mengatakan bahwa pemberian subsidi memberikan dampak positif meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Peningkatan hasil produksi antar responden berbeda tergantung pada jenis dan jumlah bantuan yang diterima oleh responden. Hasil produksi responden nelayan setelah menerima bantuan meningkat (300%), pembudidaya ikan (200%) dan pengolah (150%) seperti terlihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Rata-rata Hasil Produksi Sebelum dan Sesudah Menerima Subsidi Perikanan di Kabupaten Pidie Jaya

No	Tipe Responden	Rata-rata Produksi Penerima Subsidi		Peningkatan (%)
		Sebelum (kg)	Sesudah (kg)	
1	Nelayan	200 - 350	750 - 1000	300
2	Pembudidaya	75 - 260	150 - 500	200
3	Pengolah	25 - 125	75 - 250	150

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemberian subsidi sudah cukup tercapai dan dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah. Schrank (2001) mengatakan inti dari subsidi perikanan berhubungan dengan distribusi produksi, pendapatan dan keberlanjutan sumberdaya dan usaha perikanan. Sari *et al.* (2012) mengatakan strategi alokasi subsidi perikanan harus berperan penting dan berdampak positif terhadap pembangunan perikanan, efektifitas subsidi harus dapat menjaga kelestarian potensi sumberdaya ikan, kestabilan produksi perikanan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian pemberian subsidi bagi nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah di Kabupaten Pidie Jaya sangat bermanfaat dalam mengelola sumberdaya perikanan. Namun demikian untuk mencapai manfaat tersebut, maka dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan diperlukan pengaturan dalam pengelolaan seperti pembatasan jumlah tangkapan, karena tanpa pengaturan yang benar maka sumberdaya perikanan akan punah sehingga keberlanjutan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang saling berkaitan satu sama lain tidak tercapai.

Namun 20,24% responden mengatakan belum berhasil meningkatkan produksi yang disebabkan oleh waktu pemberian subsidi yang tidak sesuai dengan masa tebar pembudidaya ikan. Kegagalan peningkatan produksi tersebut sebahagian besar dialami oleh pembudidaya ikan terutama penerima subsidi dari Pemerintah Pusat, pencairan dana antara bulan Oktober – Desember dimana musim penghujan telah tiba mengakibatkan komoditas yang dibudidayakan gagal panen (banjir).

Jumlah responden non subsidi perikanan 42 responden yang terdiri dari nelayan 22 orang, pembudidaya 15 orang dan pengolah 5 orang, rata-rata responden mengatakan bahwa secara umum produksi tidak mengalami peningkatan disebabkan keterbatasan modal untuk melakukan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan. Namun khusus pembudidaya ikan dapat mengatur masa melakukan kegiatan budidaya terutama untuk komoditi udang windu.

Berdasarkan hasil wawancara baik penerima subsidi maupun bukan penerima subsidi berpendapat 85,71% pemberian subsidi bantuan yang akan datang sebaiknya diberikan secara kelompok, sedangkan 14,29% mengatakan dalam bentuk pribadi/perorangan. Pemberian subsidi perikanan dalam bentuk barang (*in kinds*) mencapai 73,81%, sedangkan 26,19% diterima dalam bentuk uang tunai yang langsung ditransfer ke rekening kelompok untuk selanjutnya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

Jenis bantuan yang diharapkan oleh nelayan terdiri dari: alat tangkap (48,53%), armada penangkapan (27,94%), alat bantu penangkapan (16,18%) dan mesin kapal (7,35%). Pembudidaya ikan menginginkan agroinput (79,55%), rehabilitasi tambak (13,64%) dan pengadaan mesin produksi perikanan (6,82%), sedangkan pengolah rata-rata mengharapkan tersedianya sarana dan prasarana pengolahan yang modern.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alokasi anggaran di Kabupaten Pidie Jaya mengalami fluktuasi tergantung pada persetujuan antara pemerintah dan legislatif. Pemberian subsidi yang lebih banyak dialokasikan untuk bidang perikanan budidaya, kebijakan ini dinilai berdampak positif bagi kelangsungan sumberdaya perikanan di Kabupaten Pidie Jaya. Khusus untuk kegiatan konservasi baru 5% pada Tahun 2010.
2. Status pengelolaan perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Pidie Jaya termasuk pada kategori sedang yang berarti pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan sudah cukup baik dengan kategori subsidi boleh diberikan (hijau) dan boleh diberikan dengan prinsip kehati-hatian (kuning). Pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan di Kabupaten Pidie Jaya sudah sesuai kebutuhan dengan peningkatan hasil produksi berkisar antara 150 – 300%.
3. Strategi pengelolaan perikanan di masa depan agar melibatkan *stakeholder*, mengutamakan pemberian teknologi terapan dan tetap sasaran, pengadaan pelatihan dan peningkatan peran kelembagaan.

B. Saran

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengelolaan subsidi perikanan antara legislatif dan pemerintah agar dalam implementasi alokasi anggaran harus sesuai dengan perencanaan strategis perikanan hijau, sehingga dapat mendukung upaya pemilihan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Namun diharapkan pemberian subsidi yang akan datang agar lebih diprioritaskan bagi yang membutuhkan terutama bantuan aspirasi agar lebih tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Adniyana, M.O. (2001). Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal FAE*, 19(2) : 38-49.
- Adrianto, L. (2004). Mempertajam Platform Pembangunan Berbasis Sumberdaya Alam Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- _____. (2006). Agenda Makro Revitalisasi Perikanan yang Berkelanjutan. *Jurnal Inovasi*, 6(18): 23 – 29.
- Afrianto, E dan Liviawaty, E. (1998). Pengawetan dan Pengolahan Ikan. Kanisius, Yogyakarta.
- Alim, M. N. (2008). Efektifitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2): 69 - 76.
- Anonim. (2013). Kajian Subsidi BBM FEUI 2011. <http://perspektif-hidup.blogspot.com/2012/03/kajian-subsidi-bbm-bem-feui-2011.html>, diakses tanggal 16 Januari 2013.
- Antara News. (2013). Indonesia Pertahankan Subsidi Perikanan dalam Pertemuan Apec. <http://www.antaraneews.com/print/228349/indonesia-pertahankan-subsidi-perikanan-dalam-pertemuan-apec>. Di akses pada tanggal 12 Juli 2013.
- Arikunto, S. (2010). Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
- Armida. (2012). Sistem Anggaran Pendidikan (Studi Tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.
- Atmaja, A. P. S. (2009). Keuangan Publik dalam Persepektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik. Rajawali Pers, Jakarta.
- Badrudin, B. Sumiono and Nurhakim, S. 2004. Hook Rates and Compositions of Bottom Longline Catches in the waters of the Arafura Sea. *Indonesian Fisheries Research Journal*, 10(1): 9-14.
- Basri, F. (2002). Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Erlangga, Jakarta.

- Basri. (2012). Tugas dan Wewenang PPNS Perikanan. <http://basri3.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2014.
- Bastian, I. (2006). Akutansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
- _____. (2007). The Change of Local Financial Management Organization from an Administrative to an Entrepreneurship: a Case of Kepmendagri 29/2002. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2): 88-105.
- _____. (2008). Keterlambatan APBD dalam Analisis Siklus. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2) : 115 – 130.
- Bengen, D.G. (2002). Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Pidie Jaya dalam Angka. BPS Kabupaten Pidie Jaya.
- Budiyanti, E. (2012). Analisis Rendahnya Penyerapan Subsidi Pajak. Buku Tim - 12 Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jakarta.
- Buku Putih Penanggulangan Kemiskinan. (2002). Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dahuri, R. (2000). Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.
- Damanik, R., Satria, A dan Budiati, P. (2006). Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.
- Dewi, G. P. (2012). Urgensi Subsidi Perikanan di Indonesia. Buku Tim - 12 Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jakarta.
- Dirjen Perikanan Tangkap. (2005). Petunjuk Teknis Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Dunn, W. (1994). Analisa Kenijaksanaan Publik. Terjemahan: Public Policy Analysis an Introduction. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Dye, T. R. (1987). Understanding Public Policy. Prentice Hall. Engelwood Cliffs, New Jersey - USA.

- Ekawarna., Unjaswati, S., Sam I dan Rahayu S. (2009). Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 1(1) : 49 – 66.
- Fahrianta, R. Y dan Carolina, V. (2012). Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 13(1): 57 – 72.
- Fauzi, A. (2005). Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis dan Gagasan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, M. F. (2001). Pembiayaan Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Otonomi Pendidikan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, PPS Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ginting, S. P. (1998). Konflik Pengelolaan Sumberdaya di Sulawesi Utara dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya. *Jurnal Pulau-pulau Kecil dan Lautan*, 1(2): 30 – 43.
- Ginting, A. M. (2012). Analisa Kebijakan Subsidi terhadap Perekonomian Indonesia. Buku Tim - 12 Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jakarta.
- Hadiyanti, P. (2006). Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2 (1): 33 – 46.
- Handoko, R. dan Patriadi, P. (2005). Evaluasi Kebijakan Subsidi Non - BBM. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 9(4): 42 – 64.
- Hanna, S. (1999). Strengthening Governance of Ocean Fishery Resources. *Cological Economics*, 31 : 275 - 286.
- Harjoko. (2013). Polemik Subsidi Perikanan. <http://budisansblog.blogspot.com/2013/12/polemik-subsidi-perikanan.html>. Diakses 16 Januari 2013.
- Heruwati, E. S. (2002). Pengolahan Ikan Secara Tradisional: Prospek dan Peluang Pengembangan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 21(3): 92 – 99.
- Hulaifi, (2011). Pendugaan Potensi Perikanan Laut dan Tingkat Keragaan Ekonomi Penangkapan Ikan (Kasus di TPI Sendang Biru Kabupaten Malang). *Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi*, 12 (2): 113 – 126.
- Ihssen, P. E., H. E. Booke, J. M. Casselman, J. M. Mcglade, N. R. Payne, and F. M. Utter. (1981). Stok Identification: Materials and Methods Can. *Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, (3): 1838 -1988.

- Irianto, H. E dan Soesilo, I. (2007). Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan. makalah, Disampaikan pada Seminar Hari Nasional Hari Pangan Sedunia. Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Bogor.
- Karundeng, V. (2012). Penganggaran Sektor Publik. Makalah. Universitas Manado, Manado.
- Ketaren, S. M. S, Syahrin, A. Ablisar, dan Hamdan, M. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. *USU Law Journal*, 2(2): 57 – 75.
- Laka, F. (2003). Arahkan Lokasi dan Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka – Nusa Tenggara Timur. Tugas Akhir, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Latuconsina, H. (2010). Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pompo Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, 3(2): 23 – 30.
- Lisnawati. (2012). Proyeksi Implikasi Penurunan Subsidi Pupuk terhadap Kesejahteraan Petani. Buku Tim - 12 Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Jakarta.
- Luhur, E. S. dan Sari, Y. D. (2012). Dampak Subsidi Solar terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap di Bitung dan Pelabuhan Ratu. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*, 7(2): 139 – 151.
- McNeely, J. A.(1992). *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati. Mengembangkan dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi Untuk Melestarikan Sumberdaya Hayati*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Nasution, Z. (2008). Perkembangan Ekonomi Masyarakat Nelayan Perairan Umum Lebak Lebung. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 2(2) : 249 – 264.
- Nikijuluw, V.P.H. (2002). Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Kerja Sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Nohria, N and Gulati, R. (1994). Firms and Their Environments. In : Smelser, N.J. and Swedberg, R. (Eds). *The Handbook of Economic Sociology*. Princenton University Press. Princenton, NJ. pp. 529-599.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardijono. (2008). Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Markus, T. (2010). Towards Sustainable Fisheries Subsidies: Entering a New Round of Reform Under the Common Fisheries Policy. *Marine Policy Journal*, 34: 1117-1124.
- Masloman, I. (2010). Revitalisasi Pembangunan Perikanan. Makalah, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Melmambessy, E. H. P. (2010). Pendugaan Stok Ikan Tongkol di Selat Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah agribisnis dan Perikanan*, 3(1): 53 – 61.
- Millazo, M. (1998). Subsidies in World of Fisheries a Re-examination. WB Tech. World Bank Paper. No. 406, Fisheries Series. The World Bank, Washington DC.
- Minggawati, I dan Saptono. (2012). Parameter Kualitas Air untuk Budidaya Ikan Patin (*Pangasius pangasius*) di Keramba Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Hewani Tropika*, 1(1): 1 – 4.
- Muchlisin, Z.A., Fadli, N., Nasution, A. M., Astuti, A., Marzuki dan Musni, D. (2012a). Kebijakan Subsidi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Laporan Penelitian WWF, Banda Aceh.
-
- (2012b). Analisis Subsidi Perikanan Non BBM di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Depik*, 1(3) : 175 – 182.
- Mulyadi, S. (2005). Ekonomi Kelautan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mutiarin, D. (2012). Dinamika Kebijakan Anggaran Publik : Konfigurasi dan Dampak Terhadap Pembangunan Daerah. Makalah yang Disampaikan dalam Orasi Ilmiah di Universitas Tri Dharma Kalimantan Timur. 15 September 2012, Samarinda.
- Oktaviano, A. (1998). Prospek Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Asin pada Industri Kecil Karya Damai Kelurahan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Pinto, S. (2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). <http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html>. Diakses tanggal 21 Juni 2013.
- Pontoh, O. (2011). Penangkapan Ikan dengan Bom di Daerah Terumbu Karang Desa Arakan dan Wawontulap. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Tropis*, 7(1): 56 – 59.
- Purnamawati (2002). Peranan Kualitas Air terhadap Keberhasilan Budidaya Ikan di Kolam. *Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Pontianak, Warta Penelitian Perikanan Indonesia*, 8(1): 1 - 14.
- Robins, S. (1996). *Perilaku Organisasi*. PT. Prenhalindi, Jakarta.
- Raduan, M., Sharir, M dan Aziz, Z. (2007). Masalah Nelayan Tradisional di Semenanjung Malaysia: Penyelesaian Tanpa Kesudahan. *Jurnal Jati*, 12: 247 – 258.
- Rinusu dan Mastuti, S. (2003). *Panduan Praktis Mengontol APBD. Civic Education and Budget Transparency Advocation (Ciba) and Friedrich Ebert Stiftung (FES)*, Jakarta.
- Rohendi, D., Sutarno, H., dan Ginanjar, M. A. (2010). Efektivitas Metode Pembelajaran Demonstrasi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan, Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (PTIK)*, 3(1): 12 – 18.
- Ruray, Z. D. (2012). *Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Provinsi Maluku Utara (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara)*. Tesis, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Saptorini, (1989). *Persepsi Siswa SMA Se-Kotamadya Semarang Mengenai Narkotika*. Laporan Penelitian IKIP, Semarang.
- Sari, Y. D., Luhur, E. S dan Zulham, A. (2012). Dampak Subsidi Solar terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan di Bitung, Sulawesi Utara. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*, 7(1) : 1 – 17.
- Schoor, D. K. (2012). Materi Persentasi: Kebijakan Subsidi Perikanan, Menuju Perikanan yang Bertanggung Jawab. Dipersentasikan pada: Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Terkait Reformasi Subsidi Perikanan (Subsidi Hijau Perikanan – Green Fisheries Subsidies) Menuju Perikanan Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan di Aceh Besar, Indonesia.

- Schoor, D. K. dan Caddy J. F. (2007). Kriteria Berkelanjutan untuk Subsidi Perikanan. Suatu Alternatif bagi WTO dan Institusi-institusi Terkait Lainnya, Kerjasama antara United Nations Environment Programme (UNEP), Economics and Branch (ETB), dan World Wide Fund for Nature (WWF), Jenewa.
- Schrank, W. E dan Keithly, W. R. (1999). The Concept of Subsidies. FAO Fisheries Technical Paper. No. 437. FAO, Rome.
- Schrank, W. E., (2001). Subsidies for Fisheries. A Review of Concept. In: FAO Papers Presented at The Expert Consultation on Economic Incentive and Responsible Fisheries. Rome, 28 November 1 Desember 2000, Rome, 11 - 40.
- Sholeh, M. (2010). Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategi Penanggulangannya. Makalah. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sianipar, P. (2011). Pengawasan Sumberdaya Perikanan. <http://mukhtarapi.blogspot.com/2011/05/pengawasan-sumberdaya-perikanan.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2014.
- Soegijoko dan Kusbiantoro. (1997). Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Grasindo, Jakarta.
- Spencer, M. H and Amos Jr O. M. (1993). Contemporary Economics. Edisi 8. Whort Publishers, New York.
- Stanis, S, Supriharyono, dan Bambang A.N. (2007). Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Melalui pemberdayaan kearifan lokal di kabupaten lembata Propinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Pasir Laut*. 2(2): 67-82.
- Sumaila, U. R., Khan, A. S., Dyck, A. J., Watson, R., Munro, G., Tydemers, P and Pauly, D. (2010). A Bottom – Up Re-Estimation of Global Fisheries Subsidies. *Journal Bioeconomic.*, 12 : 201 – 225.
- Suminto. (2004). Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai Bahan Penyusunan Budget in Brief (Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan), Jakarta.
- Sumodiningrat, G. (1998), Membangun Perekonomian Rakyat. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiarto. (2007). Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif. Cetakan Keempat. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyo, B. (2012). *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*. Cetakan Kedua. Universitas Terbuka, Tangerang.
- Suparmoko, M. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi ke – 5. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE) Yogyakarta, Yogyakarta.
- Surachman, E. (2011). Probleman Pendidikan Anak pada Keluarga Nelayan Studi Kasus: Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk – Tangerang. *Jurnal Komunitas*, 5(1): 49 – 56.
- Sutrisno, R. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Philosophy Press Bekerja Sama Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Syahailtua, A. (1993). Identifikasi Stok Ikan, Prinsip dan Kegunaannya. *Oseana*, 2(18): 55 – 63.
- Syamsury, I. (2013). *Revitalisasi Pembangunan Perikanan*. <http://www.scribd.com/doc/33306691/revitalisasi-Pembangunan-Perikanan>. diakses pada 27 Oktober 2013.
- Welsch, H. G. (2000). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Salemba Empat, Jakarta.
- Winata, A dan Yuliana, E. (2010). Peran Masyarakat Pesisir dalam Penerapan Strategi Konservasi Sumberdaya Laut (Kasus di Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi*, 11(2): 122 – 132.
- Wiyono, E. S. (2006). Mengapa Sebahagian Besar Perikanan Dunia Overfishing? (Suatu Telaah Manajemen Perikanan Konvensional). *Jurnal Inovasi*, 6(18): 33 – 36.
- Wuryandani, D dan Meilani, H. (2011). Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut untuk Menunjang Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(1): 395 – 422.
- WWF-Indonesia. (2013). *Sumbangan Pemikiran dalam Penyusunan Pedoman Kebijakan Subsidi untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan di Indonesia*.

- Yuliana, E. dan Winata, A. (2012). Pengaruh Karakteristik dan Persepsi terhadap Tingkat Partisipasi Anggota dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Bumi Lestari*, 12 (2): 251 – 259.
- Yusgiantoro, P. (2000). Ekonomi Energi, Teori dan Praktik. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin, M. (2009). Estimasi Potensi dan Pemetaan Daerah Potensial Penangkapan Ikan Pelagis di Perairan Selayar dengan Menggunakan Citra Satelit Aqua/Modis. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 19 (1): 36 – 42.
- Zulham, A. (2008). Dampak Subsidi Terhadap Surplus Produsen dan Total Benefit Perikanan Tangkap Pantura Jawa Tengah. *Jurnal Bijak dan Riset Kelautan dan Perikanan*, 3(1): 1 – 12.



Lampiran 1. Nama-Nama Responden Penelitian Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Responden	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Perkerjaan
1	Meureudu	Fauzan	35	L	SMA	wiraswasta
2		Rusdi Hasan	47	L	SMP	nelayan/perikanan
3		M. Yusuf Ahmad	55	L	SMP	nelayan/perikanan
4		Anwar	38	L	SMA	pedagang
5		Suherman Adam	44	L	SMA	nelayan/perikanan
6		M. Yunus	39	L	SMA	wiraswasta
7		Makmur Idris	41	L	SMA	wiraswasta
8		Rusli	40	L	SMA	wiraswasta
9		M. Yusuf Budiman	50	L	SMP	wiraswasta
10		Mardani Ramli	42	L	SMA	pedagang
11		Muhammad	73	L	SD	nelayan/perikanan
12		T. Yusrizal	36	L	SMA	wiraswasta
13		Umar Syam	84	L	SD	Petani
14		Sitti Meutia Rahmah	33	P	Diploma III	ibu rumah tangga
1	Meurah Dua	Nasrul Husna	50	L	SMP	wiraswasta
2		Rusdi Rusli	44	L	SMA	wiraswasta
3		Budiman	39	L	SMA	nelayan/perikanan
4		Amri	53	L	SMA	Wiraswasta
5		Azhar Syahbudin	41	L	SLTP	Nelayan
6		Mustafa M. Gade	41	L	SD	Nelayan
7		A. Manaf	46	L	SLTP	Petani
8		Sulaiman. AR	43	L	SLTP	Petani
9		Hasan Basri	38	L	SMA	nelayan/perikanan
10		Muhammad Asyik Ali	82	L	SD	Petani
11		Syauki M. Gade	35	L	SLTP	Nelayan
12		Zulkarnaini	49	L	SLTA	Petani
1	Jangka Buya	Irwan	58	L	SMP	nelayan
2		Syarifuddin Sulaiman	51	L	SMA	nelayan
3		Iskandar	49	L	SLTA	Pedagang
4		Murtadha	31	L	SLTA	Wiraswasta
5		T. Bahron Syah, TB	48	L	SMP	wiraswasta
6		Marzuki	48	L	SMA	pedagang
7		Bustami Yunus	40	L	Diploma III	wiraswasta
8		A. Rahman Usman	48	L	SMA	Petani

Lanjutan Lampiran 1

9		Bukhari	43	L	SMA	nelayan/perikanar
10		Tarmizi Nurdi	35	L	SD	Tani Tambak
11		Ibnu Gani	49	L	SMP	wiraswasta
12		M. Amin Agani	48	L	SMA	wiraswasta
1	Trienggadeng	Ismet Tanjung	39	L	Sarjana	wiraswasta
2		Junaidi Hamid	31	L	SMP	nelayan/perikanar
3		Suryadi	35	L	SMA	nelayan/perikanar
4		Abubakar Puteh	52	L	SMP	nelayan/perikanar
5		Sulaiman Ali	44	L	SMP	wiraswasta
6		Musri Zainal	49	L	SMA	Wiraswasta
7		Idris Abu Bakar	44	L	SLTP	Petani
8		Abdul Jalil	41	L	SLTA	Wiraswasta
9		Cut Ali	41	L	SLTP	Wiraswasta
10		T. Hanafiah	56	L	SLTA	Wiraswasta
11		Aiyub Abakar	58	L	SD	Petani
12		Ibrahim Zainal	44	L	SD	Sopir
13		Yusriani	38	P	SMA	ibu rumah tangga
14		Ramlan Rusli	42	L	SMA	wiraswasta
15		Saiful Munawar	33	L	Diploma III	pelajar/mahasiswa
16		Syarifuddin Gade	41	L	SMP	Petani
17		Zainuddin Ajad	56	L	SD	Petani
18		Aiyub Ibrahim	40	L	SLTP	Petani
19		Sulaiman	27	L	SMP	wiraswasta
20		Rosni	37	P	SMA	Petani
1	Bandar Baru	Muhammad M. Piah	48	L	SMA	wiraswasta
2		Azhari Yahya	37	L	SMA	wiraswasta
3		Halidin, YS	37	L	SMA	Pedagog
4		Musri	29	L	SMP	nelayan/perikanar
5		M. Gade Ali	60	L	SD	Pedagog
6		Rahmadani	32	L	SMA	wiraswasta
7		Fakrurrazi	24	L	SMA	wiraswasta
8		Suryadi	26	L	SMP	nelayan/perikanar
9		Ibrahim	69	L	SD	nelayan/perikanar
10		Syakban Adullah	30	L	SMP	nelayan/perikanar

Lanjutan Lampiran 1

11		Usman Amin	50	L	SMP	Wiraswasta
12		M. Yusuf	45	L	SMA	Petani
13		Bakhtiar Syamaun	43	L	SLTP	Wiraswasta
14		Zainuddin S	31	L	SMP	Wiraswasta
15		Mulyadi sulaiman	34	L	SMP	Petani
16		M. Ali Malek	60	L	SMP	Wiraswasta
17		Syamsuddin Hasan	42	L	SMA	nelayan/perikanar
18		Nadarullah	37	L	SMA	Wiraswasta
19		Ibrahim	39	L	SMP	Wiraswasta
20		Muchlis	43	L	SMA	Petani
21		Rusli Hasan	35	L	Diploma III	Wiraswasta
22		Mahdi Husin	44	L	SMP	nelayan/perikanar
23		Muhammad Yunus	45	L	SARJANA	Wiraswasta
24		Kafrawi	40	L	SLTP	Petani
1	Ulim	Syafari Risyad	45	L	SMA	nelayan/perikanar
2		Abakar Majid	52	L	SMP	Wiraswasta
3		Ridwan Juned	42	L	SMP	Wiraswasta
4		M. Amin Sulaiman	50	L	SMA	nelayan/perikanar
5		Abakar Yusuf	33	L	SMA	Petani
6		Maskur	27	L	Sarjana	Wiraswasta
7		Kamaruzzaman	55	L	SMP	Petani
8		Basri Abu Bakar	45	L	SMA	nelayan/perikanar
9		Aiyub Ahmad	38	L	SMA	nelayan/perikanar
10		Roji Iswanto	27	L	SMA	pelajar/mahasiswa
11		Sabri Ilyas	34	L	SMA	Petani
1	Panteraja	Muhammad Jafar Bardan	30	L	SMP	Petani
2		Armia Amin	50	L	SMP	Wiraswasta
3		Razali Husen	45	L	SMA	Petani
4		Marzuki Amad	43	L	SLTP	Wiraswasta
5		Junaidi Ibrahim	37	L	SMA	Pedagang
6		M. Yakob Husen	29	L	SMP	nelayan/perikanar
7		Asri Burhanuddin	60	L	SD	Pedagang
8		Muhammad M. Dian	32	L	SMA	wiraswasta

Lanjutan Lampiran 1

9	Armia Yusuf	41	L	SLTP	Wiraswasta
10	Barwaluddin	56	L	SLTA	Wiraswasta
11	Usman Adam	58	L	SD	Petani
12	Bustami Daut	35	L	SLTP	Nelayan
13	Zulkifli	49	L	SLTA	Petani
14	Alibasyah Hasan	58	L	SMP	nelayan
15	Jamaluddin M. Yunus	35	L	SMA	Wiraswasta
16	Hendra Wansyah	38	L	SLTP	Pedagang
17	Sufrianto	33	L	SLTA	Wiraswasta
18	Rosma M. Ali	35	L	SLTA	Wiraswasta
19	Bahagia Yakob	40	L	SLTA	Wiraswasta
20	Muhammad Ali	35	L	Sarjana	Petani
21	Aji Azhar	43	L	SMA	Wiraswasta
22	Latifah Mahmud	52	P	SD	ibu rumah tangga
23	Basyariah, M. Yusuf	50	P	SMA	Petani
24	Rusli M. Yahya	35	L	SMA	Wiraswasta
25	M. Saleh Yunus	38	L	SLTP	Wiraswasta
26	Marzuki	47	L	SMP	nelayan/perikanan
27	Awahab Daud	55	L	SMP	Wiraswasta
28	Syhabuddin	38	L	SMA	pedagang
29	Sulaiman	44	L	SMA	nelayan/perikanan
30	Kamarudin M. Yahya	51	L	SMP	nelayan/perikanan
31	M. Yusuf Usman	43	L	SD	Petani
32	Syawaluddin	21	L	SLTA	pelajar/mahasiswa
33	Kamariah Agani	50	P	SMP	ibu rumah tangga

Lampiran 2. Lembar Kuesioner Penelitian

No.

KUESIONER UNTUK PERIKANAN TANGKAP

DESA/KEL. :
 KECAMATAN :

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Kelamin: L/ P
 Umur :
 Pendidikan Terakhir : SD / SMP Sederajat / SMA Sederajat / PT*
 Status : Kawin / Belum Kawin
 Jumlah anak : orang
 Pengalaman sebagai nelayan : tahun
 Pekerjaan Sampingan :
 Asal Daerah :
 No Tlp/HP :

II. ANALISIS USAHA PERIKANAN

1. Sudah berapa lama bapak menekuni pekerjaan perikanan tangkap (menangkap ikan): tahun.
2. Apakah pekerjaan **menangkap ikan** ini merupakan **profesi secara** turun temurun dari orang-orang tua dahulu? Ya/tidak*. Jika tidak, mengapa Bapak memilih pekerjaan menangkap ikan ini (sebutkan):

3. Apakah Bapak akan terus ingin menekuni pekerjaan menangkap ikan ini? Ya/tidak*. Mengapa?

4. Menurut bapak apa ada perbedaan jumlah hasil tangkapan (kg) dahulu (5 tahun yang lalu atau sebutkan tahunnya.....) dengan sekarang? : ada/tidak*
 Kalau ada, apakah sekarang : lebih banyak/lebih sedikit*
5. Selama bapak menjadi nelayan, berapa jumlah hasil tangkapan terbanyak yang pernah bapak alami?:kg, tahun berapa itu terjadi:.....
6. Selama bapak menjadi nelayan, berapa jumlah hasil tangkapan terendah yang pernah bapak alami?:.....kg, tahun berapa itu terjadi:.....

7. Menurut bapak, apa penyebab perubahan hasil tangkapan tersebut?:

8. Deskripsi perbandingan alat tangkap, jenis ikan, jumlah hasil tangkapan, dan harga jual ikan masa dahulu (5 tahun lalu) dengan sekarang.

No.	Komponen	Dahulu (Soal 4)	Sekarang	Harga beli (sekarang)
1	Alat tangkap yang digunakan	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
2	Jenis ikan hasil tangkapan	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
3	Trip penangkapan dalam seminggu dan jam setiap trip			
4	Rata-rata hasil tangkapan (kg per hari/minggu/bulan*)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
5	Lokasi penangkapan			
6	Jarak lokasi penangkapan dari bibir pantai terdekat			
7	Rata-rata harga jual ikan (Rp/kg)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	
8	Ikan tangkapan dijual kemana?			

*) pilih salah satu

9. Dari mana Bapak memperoleh modal usaha :
- modal sendiri
 - pinjam teman/tetangga
 - pinjam dari koperasi :
 - Jumlah pinjaman :; tingkat bunga : persen
 - pinjam dari Bank :Jumlah pinjaman :; tingkat bunga :%

III. Subsidi Perikanan

10. Apakah bapak pernah mendapat bantuan?: Ya/ Tidak

11. Kalau ada dalam bentuk apa? berapa kali ? dan dari siapa?

No	Jenis bantuan	Pemberi	Tahun	Berapa kali

12. Apakah semua bantuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan bapak sebagai nelayan: Ya/ tidak: Yang mana yang belum tidak sesuai?.....
Mengapa.....

13. Apakah barang/bantuan tersebut masih ada dan digunakan?: Ya/ Tidak
Jika tidak, berikan alasannya:.....

14. Bantuan apakah yang Bapak inginkan/harapkan ke depan?

15. Bagaimana cara sebaiknya bantuan tersebut diberikan? (kelompok/koperasi/perorangan), bentuknya: (uang/agroinput/dll) (pilih salah satu)

16. Apakah ada kendala/permasalahan yang Bapak rasakan dalam usaha perikanan tangkap? (ada/tidak). Kalau ada, kendala apa saja?.....

17. Menurut Bapak, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?

Pidie Jaya,

Desember 2013

Surveyor

Responden

Sastri, S.Pi

(_____)

No.

KUESIONER UNTUK PERIKANAN BUDIDAYA

DESA/KEL. :
 KECAMATAN :

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Kelamin: L/ P
 Umur :
 Pendidikan Terakhir : SD / SMP Sederajat / SMA Sederajat / PT*
 Status : Kawin / Belum Kawin
 Jumlah anak : orang
 Pengalaman sebagai Pembudidaya : tahun
 Pekerjaan Sampingan :
 Asal Daerah :
 No Tlp/HP :

II. Latar Belakang usaha

1. Sejak kapan bapak melakukan usaha budidaya (tawar/payau)*?. Tahun
2. Dari mana Bapak mendapat keahlian melakukan usaha perikanan budidaya ini?
 - a. Turun temurun
 - b. Dari teman
 - c. Dari lingkungan desa
 - d. Pelatihan dari pemerintah/NGO*
3. Mengapa bapak memilih profesi sebagai pembudidaya?
 - a. Tidak punya keahlian lain
 - b. Sulit mencari pekerjaan lain
 - c. Perikanan budidaya sangat menjanjikan (menguntungkan)
 - d. Profesi yang sudah turun temurun
 - e. Lain-lain, sebutkan

III. Kondisi Usaha

4. Apa jenis media pemeliharaan yang bapak gunakan:

- kolam tanah
- tambak
- Keramba
- Dll:

5. Bagaimana perbandingan produksi sekarang dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun lalu (lebih banyak, sama, lebih sedikit) (lingkari salah satu)

6. Menurut Bapak mengapa demikian? Karena

7. Sebutkan jenis, jumlah, dan harga biaya operasional yang Bapak gunakan per petak tambak/kolam/keramba.

No.	Komponen Biaya	Jumlah (ekor/kg/lt)	Harga Beli (Rp/satuan)	Keterangan (per petak)*
1	Bibit			
2	Pakan			
3	Obat-obatan			
4				

8. Dari mana Bapak memperoleh modal usaha ?

VI. Insentif

9. Apakah bapak pernah mendapat bantuan? Ya/ Tidak

Kalau ada dalam bentuk apa? berapa kali? dan dari siapa?

No	Jenis bantuan	Pemberi	Tahun	Berapa kali

10. Apakah bantuan tersebut memberikan manfaat bagi bapak? (ya / tidak) Kalau tidak, mengapa?

11. Bantuan apakah yang Bapak inginkan/harapkan ke depan?

12. Bagaimana cara sebaiknya bantuan tersebut diberikan? (kelompok/koperasi/perorangan), bentuknya: (uang/agroinput/dll) (pilih salah satu)
13. Apakah ada kendala/permasalahan melakukan budidaya? (ada/tidak). Kalau ada, kendala apa saja?
14. Menurut Bapak, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut ?
.....

Pidie Jaya,

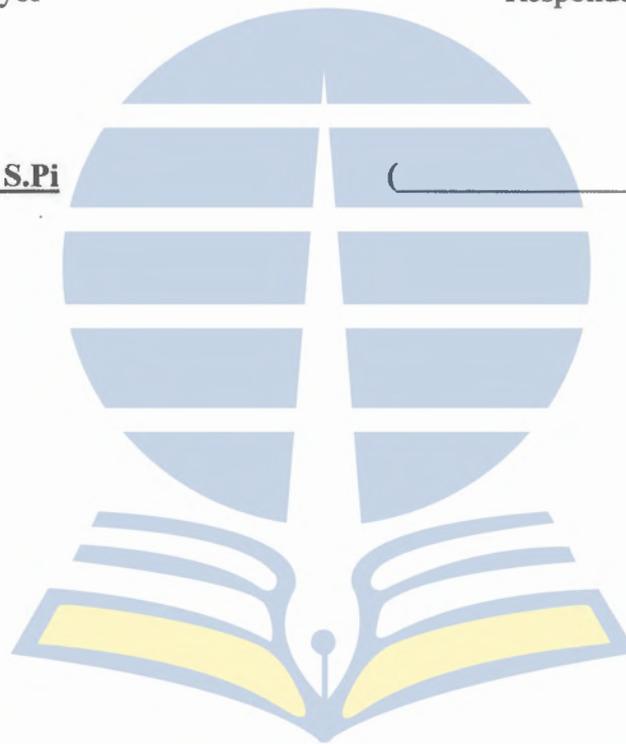
Desember 2013

Surveyor

Responden

Sastri, S.Pi

()



No.

KUESIONER UNTUK PERIKANAN PENGOLAH

DESA/KEL. :
 KECAMATAN :

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Kelamin: L/ P
 Umur :
 Pendidikan Terakhir : SD / SMP Sederajat / SMA Sederajat / PT*
 Status : Kawin / Belum Kawin
 Jumlah anak : orang
 Pengalaman sebagai nelayan : tahun
 Pekerjaan Sampingan :
 Asal Daerah :
 No Tlp/HP :

II. Latar Belakang usaha

1. Sejak kapan bapak/ibu melakukan usaha pengolahan ikan, Tahun
2. Dari mana Bapak/ibu mendapat keahlian melakukan usaha pengolahan ikan ini?
 - a. Turun temurun
 - b. Dari teman
 - c. Dari lingkungan desa
 - d. Pelatihan dari pemerintah/NGO*
3. Mengapa bapak memilih profesi sebagai pengolah ikan?
 - a. Tidak punya keahlian lain
 - b. Sulit mencari pekerjaan lain
 - c. Perikanan budidaya sangat menjanjikan (menguntungkan)
 - d. Profesi yang sudah turun temurun
 - e. Lain-lain, sebutkan

III. Kondisi Usaha

4. Jenis ikan olahan Bapak/ibu*

No.	Jenis Olahan	Vol Produksi (Kg per panen)	Harga Jual (Rp/Kg)	Keterangan (Lama Produksi dalam 1 siklus, dll)
1				
2				

5. Mengapa bapak/ibu memilih jenis ikan olahan di atas?
6. Darimana sumber bahan baku ikan tersebut di peroleh:
7. Bagaimana perbandingan produksi sekarang dibandingkan dengan 5 tahun lalu (lebih banyak, sama, lebih sedikit) (lingkari salah satu)
8. Menurut Bapak mengapa demikian? Karena

IV. Lain-lain

9. Apakah bapak pernah mendapat bantuan? Ya/ Tdak

Kalau ada dalam bentuk apa? berapa kali ? dan dari siapa?

No	Jenis bantuan	Pemberi	Tahun	Berapa kali

10. Apakah bantuan tersebut memberikan manfaat bagi bapak? (ya / tidak) Kalau tidak, mengapa?
11. Bantuan apakah yang Bapak inginkan/harapkan ke depan?
.....
12. Bagaimana cara sebaiknya bantuan tersebut diberikan? (Kelompok/koperasi/perorangan), bentuknya: (uang/agroinput/dll) (pilih salah satu)
13. Apakah ada kendala/permasalahan dalam pengolahan ikan? (ada/tidak). Kalau ada, kendala apa saja?
14. Menurut Bapak, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut ?.....

Pidie Jaya,

Desember 2013

Surveyor

Responden

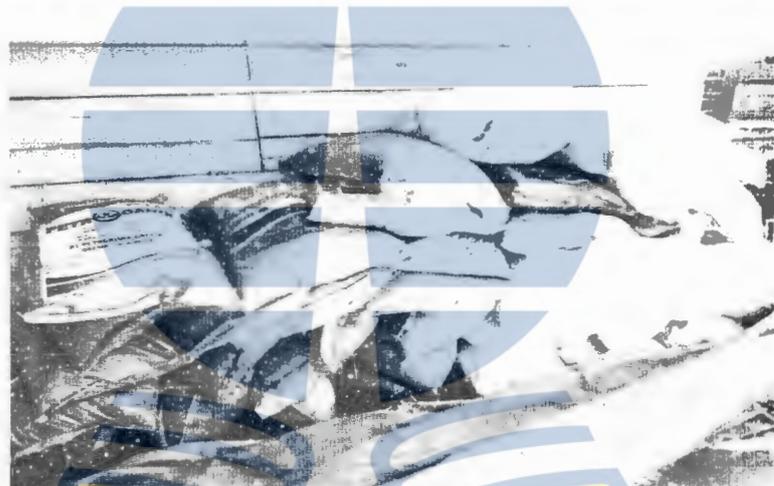
Sastri, S.Pi

(_____)

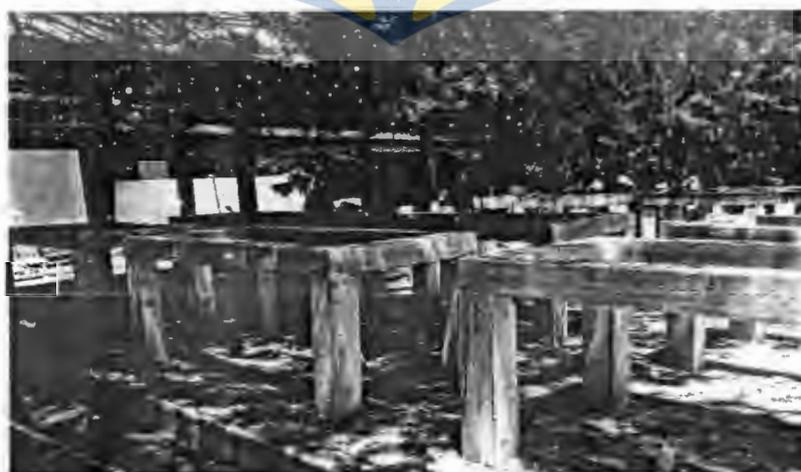
Lampiran 3. Foto penyerahan bantuan armada dan alat tangkap kepada nelayan di Kabupaten Pidie Jaya



Lampiran 4. Foto penyerahan bantuan agroinput (benih, pakan dan pupuk) kepada pembudidaya ikan di Kabupaten Pidie Jaya



Lampiran 5. Foto penyerahan bantuan sarana dan prasaran pengolahan (*cool box*, keranjang, kuali dan *chili room*) kepada pengolah ikan di Kabupaten Pidie Jaya



Lampiran 6. Foto wawancara dengan responden penelitian



